

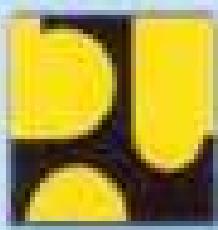


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

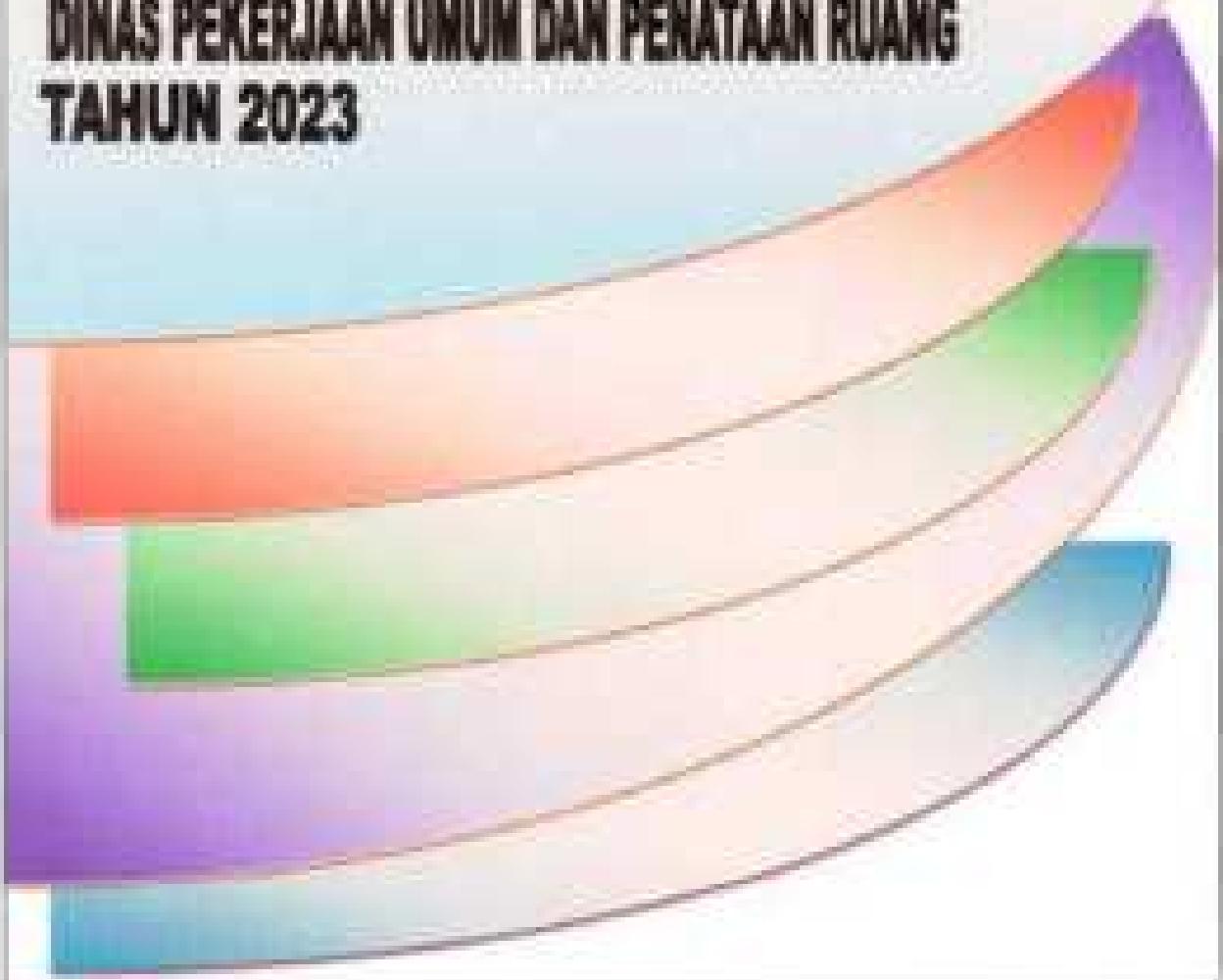


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kusnun Karana berkat karunia dan izin-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dapat terselenggara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengarisan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada hakikatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 merupakan suatu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dalam mengembangkan pembangunan ini.

Muara Sabak, 10 Januari 2024

■ Kepala Dinas


DEDY PRAYOGANA, S.T,MM.
Pembina IV (IV)
NIP. 197712252008041011



DINKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (Lima) Program dengan 5 (lima) satuan program dengan indikator kinerja program sebanyak 15 (lima belas) indikator tujuan/kurusan. Rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 90,69% atau dengan kategori sangat berhasil yang dihitung berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan sudah memenuhi target sebesar 82,80,19% dengan realisasi sebesar 74,18% dimana dari jumlah desa/kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 93 desa/kecamatan terdapat 69 desa/kecamatan yang sudah terhubung ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap.
2. Persentase jalan: Penghubung antar desa/kecamatan ke ibukota kecamatan dengan kondisi mantap dan target sebesar 65,62% telah terwujud sebesar 18,42%. Untuk jalan dengan kondisi mantap sepanjang 227,482 Km dan panjang seluruh jalan kabupaten (1236,170 Km) atau sebesar 15,42%.
3. Konsoliditas antar kawasan lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap, dari target sebesar 40% telah terwujud sebesar 48,50%. Tahun 2022 telah melaksanakan peningkatan kualitas jalan yang mendukung produksi pertanian dan perikanan sepanjang 84,77 Km di kabupaten tanjung jabung timur dari target sepanjang 174,49 Km sampai dengan tahun 2023.
4. Persentase Jaringan irigasi dalam Kondisi Baik, dari target sebesar 55% telah terwujud sebesar 58,15%.
5. Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik; dari target 55% telah terwujud sebesar 59,16% dimana dari jumlah luasan lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 61.149 Ha terdapat 3.837 Ha luasan irigasi pertanian dalam kondisi baik.



6. Cakupan Lahan Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam Kondisi Baik, dan target 61% telah terwujud sebesar 52,71% dimana dari jumlah luasan saluran dan tanggul perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 162.964 Ha terdapat 102.100 Ha jauhnya dengan kondisi baik
7. Persentase Penyelesaian PAD Sektor PLUPR, dan target sebesar 2.31% telah terwujud sebesar -11,07%. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -11,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 penurunan PAD disebabkan karena pada tahun 2023 retribusi pemanfaatan kekayaan daerah (kaf berat) menjadi target Dinas PLUPR pada APBD Penumbuhan 2023.
8. Persentase Capaian PAD dari Sensus Alat Bencit dan bantuan celak peta, dimana dari target sebesar 100% telah terwujud sebesar 83,83%. Tahun 2023 dimana dari target pendapatan dari retribusi penggarisan bantuan celak peta Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp. Rp. 11.112.940 terwujud sebesar Rp. 42.880.000 atau 83,83%.
9. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana lata ruang, dimana dan target sebesar 100% telah terwujud sebesar 100%. Pada tahun 2023 Dinas PLUPR telah mengeluarkan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebanyak 13 Rekomendasi yang telah dibahas bersama tim TKPRD Kabupaten
10. Rasio ketertiban terhadap RT/RW, dengan target kinerja sebesar 100% telah terwujud sebesar 100% dimana untuk sektor kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan baik oleh instansi pemerkirah maupun swasta harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian RT/RW yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
11. Persentase Tenaga Kerja bidang konstruksi yang terampil dan profesional, dengan target kinerja sebesar 88,20% telah terwujud sebesar 88,29%



- 12 Persentase Angkatan Kerja Bidang Konservasi yang terampil dan profesional, dengan target kerja sebesar 88,20% telah terwujud sebesar 88,25%, realisasi pencapaian di dukung oleh ketekunan nya kegiatan Pelatihan tukang terampil dan sertifikasi tenaga kerja terampil pada tahun anggaran 2023.
- 13 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dari target 90 poin telah terwujud sebesar 83,25 poin
- 14 Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP), dari target predikat BB telah terwujud dengan predikat BB.
- 15 Laporan Keuangan Sesuai SAK

Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (lima) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Bob Kegiatan dengan Total APBD sebesar Rp. 174.795.295.423,00

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.020.485.148,50 (95,56%).

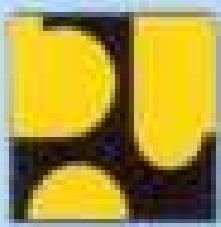


DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | 1 |
| Ringkasan Eksekutif | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Tujuan, Fungsi dan Mewenang Organisasi | 1 |
| B. Aspek Strategis Organisasi | 2 |
| C. Struktur Organisasi | 3 |
| D. Sistematika Penyelesaian | 3 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 19 |
| A. Rencana Strategis 2021-2025 | 19 |
| 1. Pernyataan Visi | 19 |
| 2. Pernyataan Misi | 19 |
| 3. Tujuan dan Sasaran Strategis | 21 |
| 4. Program dan Kegiatan | 23 |
| 5. Sasaran Program | 27 |
| 6. Indikator Kinerja Lama (IKL) | 27 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 28 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 22 |
| A. Sarana Kinerja | 22 |
| B. Analisis Sarana Kinerja | 26 |
| C. Realisasi Keuangan | 26 |
| BAB IV PENUTUP | 39 |
| A. Kesimpulan | 39 |
| B. Bantuan | 40 |

LAMPIRAN – LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

BAB

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022, urusan Juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan juga pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati tersebut diatas dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelegaran perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan;
3. Penyelegaran perencanaan, pengembangan operasional, pemeliharaan dan pengendalian jaringan sumber daya air.



4. Penyelenggaraan perencanaan, pemantauan dan pengendalian tata ruang;
5. Penyelenggaraan pemimpinan, pemberdayaan dan pengawasuan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang berkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Bupati.

B. ASPEK STRATEGIS

Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu pengembangan koneksi lokal nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massa perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/pemukiman, dan ketahanan air, sedangkan di Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah terintegrasi dan perbatasan, pengelolaan ruang bencana dan sinergi pembangunan perdamaian.

Maka guna meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber dan prasarana publik dengan memperhatikan konsistensi lingkungan,



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga

1. Penyebaran pembangunan sementara dan permanen masih di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata diseluruh daerah terutama jalan-jalan posisi menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat.
2. Kurangnya sumber galian C di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyebabkan volume material perkerasan batan jalan memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaannya.
3. Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki rusakan sungai besar dan kecil maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diukur pulu dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek.
4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota belum berjalan secara sinergi terutama dengan sentra aktivitas perekonomian daerah seperti integrasi jalan pertanian dengan jalan kabupaten dalam mengangkut hasil pertanian ke pusat pengolahan dan industri hir., dan sentra-sentra pemukiman.

b. Bidang Sumber Daya Air

1. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau pada



- wilayah Sungai dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum berjalan optimal.
2. Belum terbentuknya komisi Ingosi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatur laju dan pengelolaan jaringan Ingosi baik untuk perkebunan, pertanian maupun jalur trans.
 3. Mengatur efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keterlibatan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai dalam satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 4. Belum tertarinya pengelolaan dalam hal pemanfaatan sumber Ingosi pada jaringan Ingosi primer dan sekunder yang berada dalam satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 5. Belum maksimalnya pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 6. Belum optimálnya dalam pengendalian daya rusak air yang berdampak ekosistem kabupaten
 7. Belum optimálnya pengembangan pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai dalam kabupaten.
- C. Bidang Tata Ruang
1. Belum memadainya pembinaan penataan ruang baik kepada aspirasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun kepada masyarakat terhadap pedoman intensitas kegiatan pembinaan selama ini masih kurang.
 2. Pelaksanaan kegiatan penataan ruang seperti peningkatan kembali RTTRW Kabupaten yang menjadi dasar untuk pembuatan turunan penataan ruang dan dasar perberian izin (IMB, izin prinsip dan izin lokasi)



- masih lambat, sehingga mengganggu proses pelaksanaan perijinan kepada masyarakat.
- b. Masih terbatas pengawasan perizinan ruang, sehingga banyak terjadi penyimpangan seperti bangunan tanpa izin, terjadi perubahan pemakaian bangunan.
 - c. Belum benodanya Peraturan Daerah tentang sanksi administratif perdata dan pidana untuk pelanggaran pemakaian ruang.
 - d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perizinan ruang, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemakaian ruang.
- d. Bidang Jasa Konstruksi:
- 1. Masih kurangnya pembinaan terhadap desain bangunan yang pro lingkungan.
 - 2. Masih adanya Badan Usaha Jasa Konstruksi tenaga teknis yang memangkap tenaga administrasi dan sebagai direktur.
- Kurang sekertifnya pembinaan jasa konstruksi sehingga usaha jasa konstruksi masih memerlukan pembinaan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Penanggulang Daerah Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdiri atas :

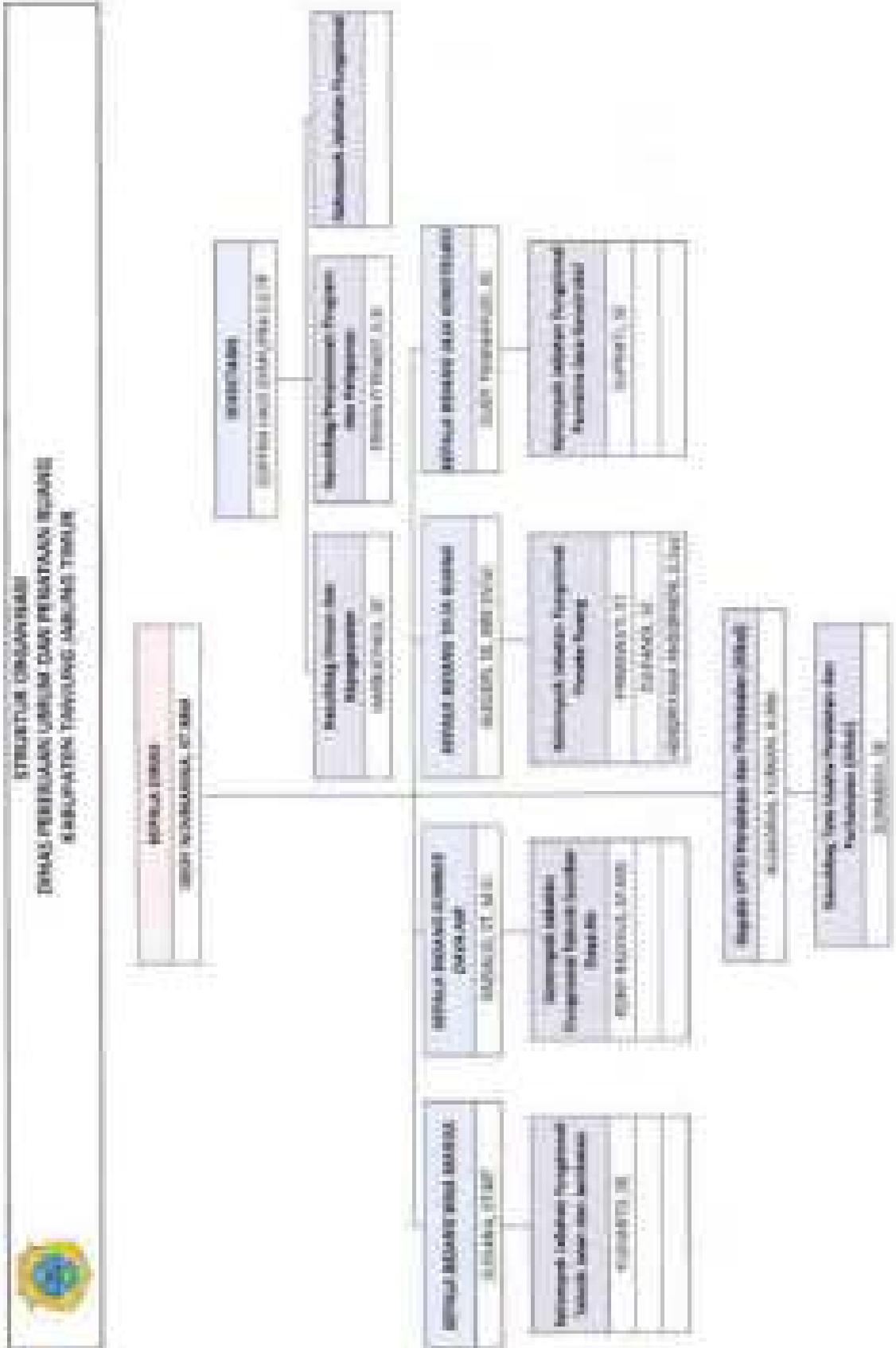
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepengawasan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, dan
 - 3. Kompleks jabatan fungsional.



- c. Bidang Bina Marga, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Tata Ruang, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Bidang Jasa Infrastruktur, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- g. UPTD

Secara func. struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang sebagai mana bagan berikut :





L. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tangerang Selatan sebanyak 66 orang dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|------------|
| a. Pejabat Struktural | : 10 orang |
| b. Fungsional Ahli Muda | : 8 orang |
| c. Fungsional Ahli Pertama | : 2 orang |
| d. Staf Pelaksana | : 47 orang |

Kondisi jumlah pegawaai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Konsistensi Pegawai Dinas PUPT
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

| Gol/Pendidikan | S-2 | S-1 | D-3 | DMA | DAP | Jumlah |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----|-----------|
| Pembina Tk. I (VTP) | 1 | 1 | | | | 2 |
| Pembina (VTP) | 2 | | | | | 2 |
| Penata Tk. I (B1A) | 2 | 7 | | | | 9 |
| Penata (B1C) | 1 | 9 | | | | 10 |
| Penata Muda Tk. I (B2B) | 12 | 1 | 3 | | | 16 |
| Penata Muda (B2C) | 11 | 1 | 3 | | | 15 |
| Pengatur Tk. I (B3C) | | 2 | 9 | | | 11 |
| Pengatur (B4C) | | 2 | 1 | | | 3 |
| Pengatur Muda Tk. I (B5C) | | | 1 | | | 1 |
| Pengatur Muda (B6C) | | | | | | |
| JUMLAH | 4 | 37 | 8 | 16 | | 66 |



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejama tahun 2023. Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tugas pokok dan fungsi, tujuan strategis, makna dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

BAB II – Perencanaan dan Pengaruh Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021-2026; Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dan Perkembangan Kinerja Tahun 2023. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi misi dan ketujuhan umum serta rencana kinerja tahun 2023.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan untuk hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2023 termasuk ditelurnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi yang akan diambil. Selain itu juga dilaporkan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur





PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Rencana Strategis (Rencstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perwakilan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor T Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kawenangan Pj. Gubernur Kawenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

1. Pernyataan Visi:

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT).”

2. Pernyataan Misi:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung dalam 4 Misi sebagai pengembangan dari visi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertemu Pada Sektor Pertanian dan Perkebunan;
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.



- Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataran Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut diberikan secara operasional dalam tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beserta dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 meliputi 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun sebagai berikut:

- Meningkatnya Aksesibilitas antar wilayah
- Meningkatnya Infrastruktur penunjang Pertanian dan Perkebunan
- Meningkatnya Hendakotan Atli Daerah (HAD) sektor PU/PR
- Mengendalikan Penataan Ruang
- Meningkatnya Ketersediaan Tersegi Kerja Bidang Konstruksi
- Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Amanah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 7 (tujuh) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dikemasukan yaitu

- Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan antar desa dan kecamatan
- Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perkebunan



3. Peningkatan Infrastruktur Inggris dan Tangguh penunjang Pertanian dan Perikanan
 4. Peningkatan PAD dan Sewa Alat Berat dan biaya cekak pete
 5. Peningkatan Kebutuhan Tata Ruang Wilayah
 6. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Tenaga Kerja Bidang Konstruksi
 7. Peningkatan Pelayanan Publik, Akurasi dalam Kinerja dan Keuangan
-
4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan tugas dan fungsi yang berikan kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan susunan strategis yang telah ditetapkan.
- Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terdiri dari :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktikar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Perekaman Penilaian Hasil dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepogowatan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 3.1 Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instansi Lainnya/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Perlakuan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Rathan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.7 Penyiangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 6.1 Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Kegiatan Pemerintahan Daerah Melalui Dinas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kondangan Dinas Jabatan
 - 7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penitipan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - 7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

III. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawat
 - 2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawat
 - 2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawat

III. Program Penyelenggaran Jalan, dengan kegiatan sebagai berikut:



1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perancanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 1.2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 1.3 Pembangunan Jalan
 - 1.4 Pembangunan Jembatan
 - 1.5 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
 - 1.6 Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 1.7 Pemeliharaan Rutin Jembatan

IV. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Gakupan Oberah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPAKO

V. Program Penyelenggaran Penataan Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:



- 1.1 Pelaksanaan Penetapan Subsensi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
3. Sasaran Program:

Sasaran program ini menunjukkan berfungsiya output pengawasan internal yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penanaman Ruang. Sasaran Program sebagai berikut:

 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
 2. Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik
 3. Cakupan Luas Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam Kondisi Baik
 4. Persentase Angkutan Kerja Bidang Konstruksi yang desifikas profesi
 5. Rasio Ketarikan Terhadap RTRW
 6. Indeks Pelayanan Instansi

II. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan Indikator Kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase jalan Penghubung antar desa/kelurahan ke daukota kecamatan dengan kondisi mantap
2. Konektivitas antar klasen jalan pertanian dan perkerahan dalam kondisi mantap
3. Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik
4. Cakupan Luas Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam Kondisi Baik.



5. Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat dan Biaya untuk paka
6. Rasio Konsesian Terhadap RTBW
7. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
8. Prediksi Akuntabilitas Kinerja (APDP)
9. Laporan Keuangan Sesuai SAP

Adapun target IKU telah di tetapkan sebagai mana tabel berikut.

| Kriteria | Indikator Kriteria | Target Kinerja | | | | | |
|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Peningkatan Inflasi/rate Dana Jalan dan Jembatan agar dapat dikenakan biaya | Persentase pen- ingkatan rate inflasi/rate denda/jasa dapat dikenakan biaya | 75,7% | 94,4% | 85,6% | 85,9% | 94,2% | 99,87% |
| Peningkatan Inflasi/rate Pertambang Perbaikan dan Perbaikan | Persentase arah stabilitas inflasi pertambang dan perbaikan dalam kualitas mendekati | 8% | 120% | 40% | 80% | 100% | 100% |
| Peningkatan Inflasi/rate Dana Jaringan Inggil, seluruh dan yang menyediakan Proyek Tambahan Pengen- alan Perbaikan | Catatan Lalu- jalan Pengen- alan Perbaikan Rata-Rata | 80,12 % | 80% | 80% | 87% | 80% | 90% |
| Peningkatan PAD dari Sewa Alat Berat dan Biaya untuk paka | Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat dan Biaya untuk paka | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan Rata-rata Tingkat Keung-Wisayah | Rasio Konsesian Terhadap RTBW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | Kode-KM (Indikator Kinerja Masa Depan) | TM | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|--|---|------|------|------|------|------|------|
| Peringkat Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keberupayaan | Prediksi Akuntabilitas Kinerja (PKAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laporan Kinerja Dinas DAP | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |

5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 untuk seluruh indikator yang ada pada sasaran dan kgiatan telah di tetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sesuai dengan target kinerja. Berikut ini dapat disampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 174.785.235.423,00



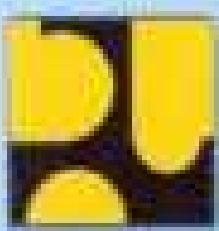
Tabel 2.1
Pegangan Kerja Tahun 2023

| No | Tujuan Sosial | Indikator Sosial | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Aksesibilitas antar wilayah | Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan | 82,80% |
| 1.1 | Peningkatan Infrastruktur Desa Jalan dan Jembatan antar desa dan kecamatan | Persentase jalan Penghubung antar desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dengan kondisi rata-rata | 85,00% |
| 1.2 | Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan | Persentase akses kester lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi rata-rata | 40% |
| 2. | Meningkatnya Infrastruktur penunjang Pertanian dan Perikanan | Persentase Jaringan irigasi dalam Kondisi Baik | 85% |
| 2.1 | Peningkatan Infrastruktur irigasi dan Tanggul penunjang Pertanian dan Perikanan | Golongan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik | 50% |
| | | Golongan Luas Sektor dan Tanggul Perkebunan dalam Kondisi Baik | 67% |
| 3. | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PU/PUPR | Persentase Peningkatan PAD Sektor PU/PUPR | 3,31% |
| 3.1 | Peningkatan PAD dari Sewa Atas Bumi dan Izaya setelah peta | Persentase Capaian PAD dari Sewa Atas Bumi dan Izaya hasil peta | 100% |
| 4. | Mengoptimalkan Penataan Ruang | Persentase kesesuaian perencanaan ruang dengan rencana tata ruang | 100% |
| 4.1 | Peningkatan Kekuatan Tata Ruang Wilayah | Rasio Kekuatan Terhadap RT/RW | 100% |
| 5. | Meningkatnya Ketersejahteraan Tenaga Kerja Bidang Konstruksi | Persentase Tenaga Kerja bidang konstruksi yang terampil dan profesional | 88,20% |



| | | | |
|-----|--|---|---------|
| B.1 | Peningkatan Kinerjampilan dan Profesionalisme Tenaga Kerja Bidang Konstruksi | Persentase Anggota Kerja Bidang Konstruksi yang lencap dan profesional | 88,20 % |
| B.2 | Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | BB |
| | | Predikat Akuntabilitas Kinerja (PAK) | BB |
| | | Laporan Keuangan Sesuai SAK | Sesuai |
| B.3 | Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | BB |
| | | Predikat Akuntabilitas Kinerja (PAK) | BB |
| | | Laporan Keuangan Sesuai SAK | Sesuai |





PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya mencakup instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. CAPASAN KINERJA

Capaian kinerja dilihat dari pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan penghargaan maupun sanksi kepada pelaksana negara guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan



permasalahan dan solusi dalam mengajar pencapaian target kinerja sampai dengan akhir periode renstra 2021-2026.

Bebberapa hal yang perlu dianalisa dan dievaluasi dalam pencapaian indikator kinerja dapat dilihat pada masing-masing satuan dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2020

| Tujuan / Satuan | Indikator Batasan | Target 2020 | Realisasi | | | % Capai- an |
|---|---|----------------|-----------|--------|--------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Meningkatnya Aksebilitas antar wilayah | Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan | 72,89% | 72,84% | 73,12% | 74,18% | 88,60 |
| Peningkatan infrastruktur Dinas Jalan dan Jembatan antar desa dan kecamatan | Persentase jalan Penghubung antar desa/kecamatan ke ibukota kecamatan dengan kondisi mantap | 95,89% | 76,90% | 64,47% | 56,42% | 38,04 |
| Peningkatan infrastruktur Penurunan Pertambahan dan Perbaikan | Konsektifitas antara master plan pertanian dan perkotaan dalam kondisi mantap | 40% | N | 48,54% | 48,58% | 121,45 |
| Meningkatnya infrastruktur penurunan Pertambahan dan Perbaikan | Persentase Jaringan irigasi dalam Kondisi Baik | 65% | 81,58% | 64,89% | 59,15% | 107,65 |
| Peningkatan infrastruktur ditambang dan Tenggul penurunan Pertambahan dan Perbaikan | Cakupan Lahan Hijau Pertanian dalam Kondisi Baik | 65% | 81,58% | 54,89% | 59,15% | 107,65 |



| | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | | |
| | Cakupan Lahan Saluran dan Tanggap Perkembangan dalam Konstruksi Bantuan | 81% | 55,56% | 50,75% | 62,71% | 102,99 |
| Meningkatnya Pendapatan Aset Daerah (PAD) sektor PUPR | Persentase Peningkatan PAD Sektor PUPR | 3,31% | 6,41% | 8,49% | -11,87% | -472,12 |
| Peningkatan PAD dari Siswa Akhir Sekolah dan biaya operasi pada | Persentase Cakupan PAD dan Siswa Akhir Sekolah dan biaya operasi pada | 100% | 51,38% | 94,27% | 83,82% | 83,53 |
| Mengendalikan Penataan Ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| Peningkatan Ketertiban Tata Ruang Wilayah | Rasio Ketertiban Terhadap RT/RW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| Meningkatnya Ketermediasi Tenaga Kerja Bidang Konstruksi | Persentase Tenaga Kerja bidang Konstruksi yang terampil dan profesional | 88,28% | 88,38% | 88,12% | 88,24% | 100,00 |
| Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Tenaga Kerja Bidang Konstruksi | Persentase Anggota Kerja Bidang Konstruksi yang terampil dan profesional | 88,20% | 88,38% | 88,12% | 88,24% | 100,00 |
| Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IOM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | BB | BB,15 | BB,37 | BB,25 | BB,00 |



| | Laporan Keuangan Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | 100 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai KKM (Metode Kepuasan Masyarakat) | 92 | 82,15 | 82,97 | 83,29 | 94,80 |
| | Pendeklarasi Akuntabilitas Kinerja (PAKK) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Laporan Keuangan Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | 100 |

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perbaikan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat capaian target-target yang tenarik dan perolehan masing-masing indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya ditetapkan standar pencapaian kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja

| NO. | JUMLAH NILAI | KATEGORI |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 1 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 2 | 70 % s.d kurang dari 85 % | Berhasil |
| 3 | 50 % s.d kurang dari 70 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 50 % | Kurang |

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan



masing-nungan kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk mendukung tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja dan penilaian capaian indikator kinerja yang diungkapkan dalam formulir PK, di lanjutkan dengan dengan menggunakan formulir EK 1, EK 2 dan EK 3, sedangkan indikator kinerja dapat meliputi inputs, outputs, outcomes.

Dari tabel pengukuran kinerja diatas dapat dilihat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dari masing-masing tujuan/kearifan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas antar wilayah

Tabel 3.3
Analisa Capaian Kinerja Tujuan 1

| Indikator Kinerja | Target | Raihan | Capaian |
|---|--------|--------|---------|
| Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan | 82,80% | 74,19% | 89,80 |

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 89,80 dengan kategori sangat berhasil dimana dan target sebesar 82,80% telah terwakali sebesar 74,19% atau dari jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 93 desa/kelurahan terdapat 83 desa/kelurahan yang sudah terhubung ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap. Dan tujuan diatas terdapat 2 (dua) sentimen yaitu:

1.1 Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan antar desa dan kecamatan



Tabel 3.3.1
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1.1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase jalan Penghubung antar desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dengan kondisi mantap | 65,69% | 18,42% | 29,04 |

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 29,04 dengan kategori kurang dimana dan target sebesar 65,69% telah tercapai sebesar 18,42%. Untuk lebih rinci dapat disampaikan hasil capaian kinerja untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sebagai berikut :

- Tahun 2023 panjang jalan kabupaten sepanjang 1235,170 Km sesuai dengan SK Bupati Nomor 824 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Rute Jalan dan Jembatan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Jalan Kabupaten Umum jalan dengan kondisi mantap sepanjang 227.482 Km dan panjang sejauh jalan kabupaten (1235,170 Km) atau sebesar 18,42% dengan melaksanakan program peningkatan jalan ditahun 2023 sepanjang 21.257 Km dan bertambah panjang rute jalan (fungional) dengan menggunakan alat berat UPTD sepanjang 324,4 Km di kecamatan kecamatan.

Panjang jalan kondisi mantap mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 panjang jalan mantap sepanjang 795,380



Km atau 64,47% atau mengalami penurunan kondisi sepanjang 568,738 Km atau 46,09%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan penentuan tingkat keramatan jalan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penentuan keramatan jalan adalah sebagai berikut

- Kondisi mantap adalah jalan dengan perkerasan dengan lapis pondasi atau dengan konstruksi yang mana untuk penanganan hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan.
- Kondisi tidak mantap adalah kondisi jalan di luar koridor mantap dimana untuk penanganan minimumnya adalah penanganan berkala dan maksimum penanganan adalah peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksinya.

Dengan kondisi di tanjung jabung timur yg masih banyak ditangani oleh agen ketiga B (lapis pondasi bawah) belum dapat dikatakan kategori kondisi mantap dikarenakan masih perlu dilakukan penanganan berupa peningkatan jalan dengan meningkatkan konstruksi strukur jalan (perkerasan tentu maupun kali).

- Pembangunan jembatan yang telah dikerjakan pada tahun 2023 sebanyak 3 unit, sehingga sampai dengan tahun 2023 total jembatan dengan kondisi baik sebanyak 251 unit dari total jembatan sebanyak 482 unit atau sebesar 52,07%.
- Pembangunan box culvert yang sudah dikerjakan tahun 2023 sebanyak 5 unit box culvert.



1.2 Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan

Tabel 3.3.3
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1.2

| Indikator Kinerja | Target | Raihan | Capaian |
|---|--------|--------|---------|
| Konsistitas antar klasifikasi pertanian dan perikanan dalam kondisi sejajar | 40% | 48,58% | 121,45 |

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 121,45 dengan kategori sangat berhasil dimana dari target sebesar 40% telah terwujud sebesar 48,58%. Tahun 2023 telah melaksanakan peningkatan kualitas jalan yang mendukung produksi pertanian dan perikanan sepanjang 54,77 Km di kabupaten batang jatung timur dan target sepanjang 174,48 Km sampai dengan tahun 2026.

3. Meningkatnya Infrastruktur pertunjang Pertanian dan Perikanan

Tabel 3.4
Analisa Capaian Kinerja Tujuan 2

| Indikator Kinerja | Target | Raihan | Capaian |
|--|--------|--------|---------|
| Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Kondisi Baik | 55% | 59,15% | 107,55 |

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 107,55 dengan kategori sangat berhasil dimana dari target sebesar 55% telah terwujud sebesar 59,15%. Dari tujuh indikator tersebut 1 (satu) satuan yaitu



2.1 Peningkatan Infrastruktur Irigasi dan Tanggul penunjang Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.4.1
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2.1

| Indikator Kinerja | Target | Raihan | Capaian |
|---|--------|--------|---------|
| Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik | 55% | 59,15% | 107,55 |
| Cakupan Luas Saturasi dan Tenggul perkebunan dalam Kondisi Baik | 61% | 62,71% | 103,80 |

Berdasarkan tabel Standart dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2023 pencapaian capaian kinerja untuk kedua indikator diatas sebesar 107,55 dan 103,80 dengan kategori sangat berhasil. Tahun 2023 realisasi capaian kinerja untuk kedua indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Indikator cakupan luas irigasi pertanian dalam kondisi baik dari target 55% telah terlaksana sebesar 59,15% dimana dari jumlah luasan lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 8.149 Ha terdapat 3.637 Ha luasan irigasi pertanian dalam kondisi baik.
2. Indikator cakupan luas saturasi dan tenggul perkebunan dalam kondisi baik dari target 61% telah terlaksana sebesar 62,71% dimana dari jumlah luasan saturasi dan tenggul perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 162.164 Ha terdapat 102.160 Ha jaringan dengan kondisi baik.

Pencapaian target indikator tersebut diatas didukung oleh penerapan kinerja program, kegiatan dan atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan target kinerja



Panjang saluran dan tanggul yang di rehabilitasi sepanjang 67.540 meter dan Panjang saluran yang dilaksanakan pemeliharaan sepanjang 183.990 Meter.

3. Meningkatnya Pendekatan Aset Daerah (PAD) sektor PU/PB

Tabel 3.5
Analisa Capaian Kinerja Tujuan 3

| Inisiatif Kinerja | Target | Raihan | Capaian |
|--|--------|---------|---------|
| Persentase Peningkatan PAD Sektor PU/PB | 2,31% | -11,07% | -472,12 |

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar -472,12 dengan kategori kurang dimana dari target sebesar 2,31% telah terwujud sebesar -11,07% atau mengalami penurunan sebesar 11,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 penurunan PAD disebabkan karena pada tahun 2023 retribusi pemakaman kekayasan daerah (alat berat) menjadi target Dinas PU/PB pada APBD Perubahan 2023.

Dan tujuan diatas terdapat 1 (satu) sasaran yaitu :

1.1 Peningkatan PAD dari Sewa Alat Berat dan biaya cekak pete

Tabel 3.5.1
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3.1

| Inisiatif Kinerja | Target | Raihan | Capaian |
|--|--------|--------|---------|
| Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat dan biaya cekak pete | 100% | 83,83% | 83,83 |

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 83,83 dengan kategori berhasil dimana dari target sebesar 100% telah terwujud



sebesar 83,83%. Tahun 2023 dimana dari target pendapatan dan tribusi pengembangan biaya atas peta Potensi Pemanfaatan Kekayasaan Daerah sebesar Rp. 51.113.840 tersebut sebesar Rp. 42.850.000 atau 83,83%.

4. Mengendalikan Perubahan Ruang

Tabel 3.6
Analisa Capaian Kinerja Tujuan 4

| Indikator Kinerja | Target | Raihan% | Capaian |
|---|--------|---------|---------|
| Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | 100% | 100% | 100 |

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 100 dengan kategori sangat berhasil dimana dari target sebesar 100% telah terwujud sebesar 100%. Pada tahun 2023 Dinas PU/PUPR telah mengeluarkan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebanyak 13 Rekomendasi yang telah dibahas bersama Biro TKPRD Kabupaten. Dari tujuh diatas mendapat 1 (satu) sasaran yaitu:

1.1 Penegakkan Ketertiban Tata Ruang Wilayah

Tabel 3.6.1
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 4.1

| Indikator Kinerja | Target | Raihan% | Capaian |
|----------------------------------|--------|---------|---------|
| Rasio Ketertiban Timbahan KTP-PK | 100% | 100% | 100 |

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 100 dengan kategori sangat.



berhasil. Pencapaian target indikator tersebut dapat diukur oleh pencapaian kinerja program, kegiatan dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan target kinerja Persentase kewaspadaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten sebesar 100% dimana untuk setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian RTRW yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan persentase jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang tertangani sebesar 100% dimana sampai dengan tahun 2023 tidak ada kasus pelanggaran terhadap perataan ruang di Kecamatan Tanjung Jabung Timur.

Meningkatnya Keterhadapan Tenaga Kerja Bidang Konstruksi

Tabel 3.7
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Tenaga Kerja bidang konstruksi yang kompeten dan profesional | 88,20% | 88,24% | 100,00 |

Dari tujuan diatas terdapat 1 (satu) subtujuan yaitu:

3.1 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Tenaga Kerja Bidang Konstruksi

Tabel 3.7.1
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3.1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Anggota Kerja Bidang Konstruksi yang kompeten dan profesional | 88,20% | 88,24% | 100,00 |



Berdasarkan tabel Standart dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indikator datus sebesar 100.00 dengan kategori sangat berhasil. Untuk indikator kinerja tersebut realisasi pencapaian di dukung oleh teraksesnya kegiatan Pelatihan tukang tempi dan sertifikasi tenaga kerja tempi.

6. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel 3.8
Analisa Capaian Kinerja Tujuan 6:

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Nila IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 80 | 83,25 | 95,00 |
| Prediksi Akuntabilitas Kinerja (AKP) | 80 | 80 | 100 |
| Laporan Keuangan Sesuai SdP | Sesuai | Sesuai | 100 |

Dari tujuan datus terdapat 1 (satu) sesaran yaitu

6.1 Peringkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel 3.8.1
Analisa Capaian Kinerja Sesaran 6.1:

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Nila IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 80 | 83,25 | 95,00 |
| Prediksi Akuntabilitas Kinerja (AKP) | 80 | 80 | 100 |
| Laporan Keuangan Sesuai SdP | Sesuai | Sesuai | 100 |

Berdasarkan tabel Standart dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk ketiga indikator datus sebesar 95,00, 100 dan 100 dengan



kategori sangat berhasil. Tahun 2023 realisasi capaian kinerja untuk kedua indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Nilai HKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dari target 80 poin telah tercapai sebesar 83,25 poin.
2. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKUP) dari target predikat BB telah terwujud dengan predikat BB.
3. Laporan Keuangan Sesuai SAP

Pencapaian target indikator tersebut diatas didukung oleh pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 pada program penunjang tugas pemerintahan daerah.

C. REALISASI KEUANGAN

Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (lima) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan dengan Total APBD sebesar Rp. 174.785.235.429,00.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 secara umum dapat dilaksanakan sejauh dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.020.485.146,50 (95,56%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

| No | Pembahasan Indikator Kinerja | Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Realisasi | | % |
|-------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | (Rp) | (Rp) | |
| | REALISASI DAPD | 174.785.235.429,00 | 167.020.485.146,50 | 174.785.235.429,00 | 95,56 |
| 1 | IMPLEMENTASI PENGETAHUAN, DISIKAPSI DAN KONSEP PADA PEMERINTAHAN DAERAH | 15.000.000,00 | 11.000.000,00 | 15.000.000,00 | 73,33 |
| 1.1 | Penyelesaian, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80,00 |
| 1.1.1 | Perbaikan Operasional Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80,00 |

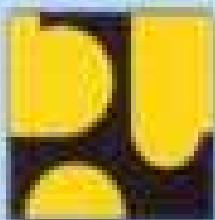


| 10.2 | Pembentukan Jata Perintah dan Pembentukan Jata Perintah Sistem | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| 11.1 | Pembentukan Jata Perintah Sistem Pengelolaan Rantau Pembentukan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 11.2 | Pembentukan Jata Perintah Rantau Pengelolaan Rantau Pembentukan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 11.3 | Pembentukan Jata Perintah Rantau Pengelolaan Rantau Pembentukan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 11.4 | Pembentukan Perintah Lahan pertanian | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 11.5 | Pembentukan Perintah Lahan pertanian Berasir | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 12 | Pembentukan Perintah Lahan pertanian BERASIR RANTAU | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 13.1 | Pembentukan Jata Pengelolaan Rantau Pengelolaan Rantau Rantau Pengelolaan Rantau Rantau Pengelolaan Rantau Rantau Pengelolaan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 13.2 | Pembentukan Jata Pengelolaan Rantau Pengelolaan Rantau Rantau Pengelolaan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 13.3 | Pembentukan Jata Pengelolaan Rantau Pengelolaan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 14 | Pembentukan Perintah Lahan pertanian (RPT) | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 15.1 | Pembentukan Jata Rantau Pengelolaan | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 15.2 | Pembentukan Rantau Pengelolaan Rantau Pengelolaan | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 15.3 | Pembentukan Rantau Pengelolaan Rantau Pengelolaan | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 15.4 | Rantau Rantau Pengelolaan | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 15.5 | Pembentukan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 15.6 | Pembentukan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 15.7 | Pembentukan Rantau Rantau Pengelolaan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 16 | Pembentukan Perintah Lahan pertanian | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 17.1 | Pembentukan Rantau Rantau Pengelolaan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 17.2 | Pembentukan Rantau Rantau Pengelolaan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |
| 17.3 | Pembentukan Rantau Rantau Pengelolaan Rantau | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,000,000,00 | Rp. 0,00 |



| No. ur | Kegiatan (atau unit kerja) Tujuan Pengadaan Bahan Baku | Rp. (jutaan rupiah) | Rp. (jutaan rupiah) | Rp. (jutaan rupiah) | Rp. (jutaan rupiah) |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 1.1.1.1 Bahan Bahan Bahan Bahan Pangan dan Minuman | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 1.1.1 | Pengadaan Bahan Bahan Minuman dan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Pangan dan Minuman | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 1.1.1.1 | Pengadaan Bahan Bahan Minuman dan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Pangan dan Minuman | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 1.1.2 | Pengadaan dan Pemasaran Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Pangan dan Minuman | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 1.1.3 | Pengadaan dan Pemasaran Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Pangan dan Minuman | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 1.1.4 | Pengadaan dan Pemasaran Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Pangan dan Minuman | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |





PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

**BAB IV
PENUTUP**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai penilaian akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran singkat pencapaian misi dan tujuan instansi sebagai jebaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kecacatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaran kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat diperlanjutkan serta ditingkatkan.



Hasil Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Keterkaitan capaian kinerja kunci yang dicantikkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh faktor-faktor lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana.
2. Dari analisis capaian kinerja pada 8 (delapan) tujuan, 6 (enam) sesaran terdapat 15 (lima belas) indikator kunci sekuruhnya merupakan indikator kunci utama sebagaimana total ukur dan semua indikator kinerja telah mencapai target dengan rata-rata diatas 85% atau dengan kategori sangat berhasil.

B. SARAN

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja disarankan sarana-sarana sebagai berikut:

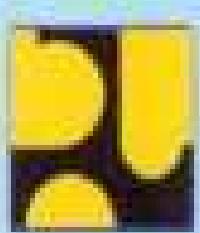
1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumber daya manusia yang berkemampuan manajemen, sarana dan prasarana serta fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk memperbaiki terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran Instansi Pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja.
3. Dalam upaya meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur disamping faktor tersebut diperlukan juga mempertimbangkan perencanaan



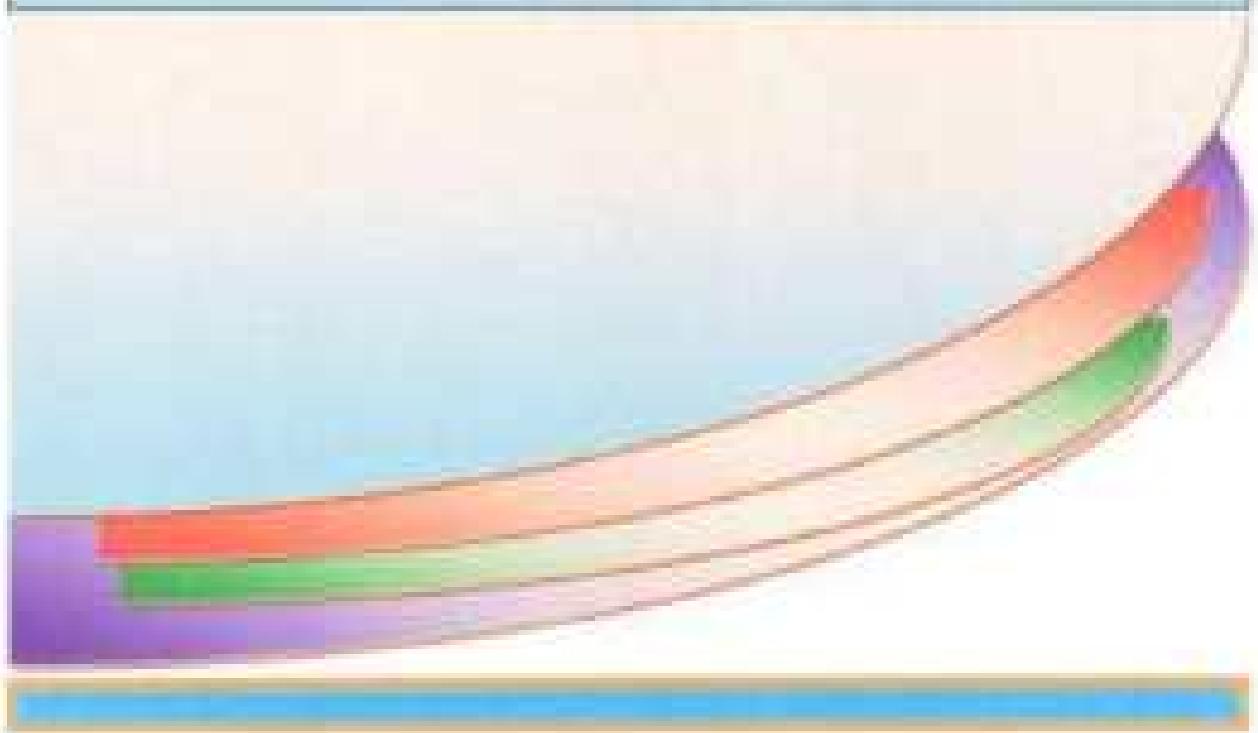
kegiatan yang lebih berkesinambungan dengan pembangunan dibidang infrastruktur serta dukungan anggaran dan APBD yang proporsional.

Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perbaikan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan jangka yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama
2. Penetapan Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
5. Rencana Aksi Tahun 2023 dan 2024
6. Pohon Kinerja dan Cascading Tahun 2023
7. Data Pendukung Pengukuran Kinerja Tahun 2023
8. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV Tahun 2023

卷之三



104

卷之三

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAMBUNG JARING

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN

DESKRIPSIAN LURAH DAN PEMERINTAH RUMAH
 2023

| No | KEGIATAN | TINJAUAN KONSEP | TARGET |
|-----|---|--|---------|
| 1 | Meningkatnya Akreditasi akta notaris | Peningkatan akreditasi akta akta dan kepatuhan | 80,00% |
| 1.1 | Peningkatan Akreditasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Peningkatan pilar fungsi dan akta notarisnya yg diberi kepercayaan dengan standar mutu | 80,00% |
| 1.2 | Peningkatan Infrastruktur Perekonomian dan Perkotaan | Peningkatan akta Notaris (pilar perekonomian dan perkotaan dalam kondisi memadai) | 80% |
| 2 | Meningkatnya Sektor Industri pertumbuhan dan berkembang | Peningkatan tingkat tingkat dalam ekonomi lokal | 10% |
| 2.1 | Peningkatan Infrastruktur Tingkat dan Tingkat peningkatan keramaian dan perkotaan | Lokasi dan tipe pertemuan dalam kondisi baik | 80% |
| | | Lokasi dan lokasi keramaian dan tingkat perkotaan dalam kondisi baik | 80% |
| 3 | Meningkatnya Pengelolaan ATR Desa/RH (PAD) sektor PUPR | Peningkatan PAD Sektor PUPR | 8,00% |
| 3.1 | Meningkatnya PAD di Desa/RH Desa/Rumah warga | Peningkatan PAD di Desa/RH Desa/Rumah warga | 100% |
| 4 | Meningkatkan Penilaian Rancangan | Peningkatan konsistensi perencanaan rancangan dengan mencapai tujuan maks | 100% |
| 4.1 | Peningkatan konsistensi Tata Ruang Wilayah | Konsistensi Tata Ruang Wilayah | 100% |
| 5 | Meningkatnya Keterpaduan antara Kerja Bakti dan Konseling | Peningkatan Tingkat Kerja Bakti dan konseling yang berpengaruh dan profesional | 80,00% |
| 5.1 | Peningkatan konseling dan konservasi Tenaga kerja dalam komunitas | Peningkatan konseling tenaga kerja dan konservasi yang berpengaruh dan profesional | 80,00% |
| 6 | Meningkatnya Pelaksanaan PUPR, Akuntabilitas Kewajiban dan Kebersihan | Misi DPK (misi kewajiban konservasi) | 80% |
| | | Pembuktian akuntabilitas kewajiban (AKBP) | 80% |
| | | Laporan kewajiban selesai (LKS) | Selesai |
| 7 | Peningkatan Pelaksanaan PUPR, Akuntabilitas Kewajiban dan Kebersihan | Misi DPK (misi kewajiban konservasi) | 80% |
| | | Pembuktian akuntabilitas kewajiban (AKBP) | 80% |
| | | Laporan kewajiban selesai (LKS) | Selesai |

Pemerintah, 10 Januari 2023

Republik Indonesia
 Kabupaten Tambung Jaring
 Tahun Anggaran 2023

DADDY NOVIAWAN, ST., MM.
 Pemerintah
 NIP. 19771112 200611 1 001

**PENGURUHAN KINERJA
ORGANISASI PIRANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG LAMPUNG**

KINERJA DAN KINERJA TERWAKIL
TAHUN 2018

LEMBAR PENGALIHAN UNTUK PEMERIKSAAN
TAHUN 2018

| NO | KINERJA DILAKUKAN | KINERJA TERWAKIL | SUDUT | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|---|---|---------|-----------|-------------|
| 1 | Penyelenggaraan Kinerja dengan Inisiatif | Penyelenggaraan kinerja dengan inisiatif dan inovasi | 100,00% | 100,00% | 100,00 |
| 1.1 | Penyelenggaraan Administrasi Untuk Menghindari Perbaikan Untuk Data dan Dokumen | Penyelenggaraan kinerja dengan inisiatif dan inovasi berorientasi dengan bantuan teknologi | 100,00% | 100,00% | 100,00 |
| 1.2 | Penyelenggaraan Administrasi Dengan Pendekatan dan Pertimbangan | Kinerja yang tidak berorientasi pada peningkatan kinerja dalam kebutuhan dan pertimbangan | 0% | 100,00% | 100,00 |
| 2 | Penyelenggaraan Administrasi Dengan Pendekatan Pertimbangan dan Perbaikan | Penyelenggaraan Administrasi dengan Pendekatan Pertimbangan dan Perbaikan | 100% | 100,00% | 100,00 |
| 2.1 | Penyelenggaraan Administrasi Organisasi dan Tingkat pengembangan Keterampilan dan Pengetahuan | Organisasi Luar Pemerintahan dengan Pendekatan Pertimbangan dan Perbaikan | 0% | 100,00% | 100,00 |
| 2.2 | Penyelenggaraan Pendekatan Arah Daerah (PAD) untuk Perbaikan | Organisasi Luar Pemerintahan dengan Pendekatan Pertimbangan dan Perbaikan | 100% | 100,00% | 100,00 |
| 3 | Penyelenggaraan Pendekatan Arah Daerah (PAD) untuk Perbaikan | Penyelenggaraan PAD Bantuan Pemerintah | 2,00% | -10,00% | -473,43 |
| 3.1 | Penyelenggaraan PAD dan Bantuan dari daerah untuk perbaikan | Penyelenggaraan PAD dan Bantuan dari daerah untuk perbaikan | 0% | 100,00% | 100,00 |
| 4 | Penyelenggaraan Pendekatan Ruang | Penyelenggaraan Administrasi pendekatan ruang dengan penilaian bantuan teknologi | 100% | 100,00% | 100,00 |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pendekatan Ruang Wilayah | Bantuan Administrasi Pemerintah Wilayah | 100% | 100,00% | 100,00 |
| 5 | Penyelenggaraan Pendekatan Tingkat Kepolisian daerah | Penyelenggaraan kinerja daerah kepolisian yang berorientasi dan profesional | 100,00% | 100,00% | 100,00 |
| 5.1 | Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembangan Tingkat Kinerja daerah daerah | Penyelenggaraan kinerja daerah daerah daerah yang mengintegrasikan profesional | 100,00% | 100,00% | 100,00 |
| 6 | Penyelenggaraan Pendekatan Politik, Masyarakat Melayu dan Kerangka | Politik Masyarakat Melayu (AMM) | 0% | 0% | 0,00 |
| 6.1 | Penyelenggaraan Pendekatan Politik, Masyarakat Melayu dan Kerangka | Layanan Kerangka Bantuan Sosial | 0% | 0% | 0,00 |
| 6.2 | Penyelenggaraan Pendekatan Politik, Masyarakat Melayu dan Kerangka | Dasar AMM (Undang-Undang Masyarakat 1) Visi dan Misi Masyarakat Melayu (VMM), Layanan Kerangka Bantuan Sosial | 0% | 100,00 | 100,00 |

Surat Edaran, tg. Januari 2019

 **Badan Penyelenggara Perencanaan dan Pembangunan
Kabupaten Tanjung Lampung**



DARMINA, ST., MM.
Penjabat TPA
NIP. 200710111969(1)111

ANSWER
KEY
ANSWER
KEY
ANSWER
KEY
ANSWER
KEY

| Section | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 5 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 6 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 7 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 11 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 13 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 14 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 15 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 16 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 17 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 18 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 19 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 20 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |

| Category | Sub-Category | Parameter | Value | Unit | Notes |
|----------|--------------|------------------|---------|------|----------------------------|
| System A | Processor | Clock Speed | 3.2 GHz | GHz | High performance |
| | | Core Temperature | 45°C | °C | Cooling system active |
| System B | Processor | Clock Speed | 3.5 GHz | GHz | Medium performance |
| | | Core Temperature | 50°C | °C | Cooling system active |
| System C | Processor | Clock Speed | 3.8 GHz | GHz | Low performance |
| | | Core Temperature | 55°C | °C | Cooling system active |
| System D | Processor | Clock Speed | 4.0 GHz | GHz | Very high performance |
| | | Core Temperature | 60°C | °C | Cooling system active |
| System E | Processor | Clock Speed | 4.2 GHz | GHz | Extremely high performance |
| | | Core Temperature | 65°C | °C | Cooling system active |
| System F | Processor | Clock Speed | 4.5 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 70°C | °C | Cooling system active |
| System G | Processor | Clock Speed | 4.8 GHz | GHz | Optimized performance |
| | | Core Temperature | 75°C | °C | Cooling system active |
| System H | Processor | Clock Speed | 5.0 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 80°C | °C | Cooling system active |
| System I | Processor | Clock Speed | 5.2 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 85°C | °C | Cooling system active |
| System J | Processor | Clock Speed | 5.5 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 90°C | °C | Cooling system active |
| System K | Processor | Clock Speed | 5.8 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 95°C | °C | Cooling system active |
| System L | Processor | Clock Speed | 6.0 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 100°C | °C | Cooling system active |
| System M | Processor | Clock Speed | 6.2 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 105°C | °C | Cooling system active |
| System N | Processor | Clock Speed | 6.5 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 110°C | °C | Cooling system active |
| System O | Processor | Clock Speed | 6.8 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 115°C | °C | Cooling system active |
| System P | Processor | Clock Speed | 7.0 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 120°C | °C | Cooling system active |
| System Q | Processor | Clock Speed | 7.2 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 125°C | °C | Cooling system active |
| System R | Processor | Clock Speed | 7.5 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 130°C | °C | Cooling system active |
| System S | Processor | Clock Speed | 7.8 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 135°C | °C | Cooling system active |
| System T | Processor | Clock Speed | 8.0 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 140°C | °C | Cooling system active |
| System U | Processor | Clock Speed | 8.2 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 145°C | °C | Cooling system active |
| System V | Processor | Clock Speed | 8.5 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 150°C | °C | Cooling system active |
| System W | Processor | Clock Speed | 8.8 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 155°C | °C | Cooling system active |
| System X | Processor | Clock Speed | 9.0 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 160°C | °C | Cooling system active |
| System Y | Processor | Clock Speed | 9.2 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 165°C | °C | Cooling system active |
| System Z | Processor | Clock Speed | 9.5 GHz | GHz | Peak performance |
| | | Core Temperature | 170°C | °C | Cooling system active |

| ID | Name | Age | Gender | Physical Characteristics | | Mental Health | | Behavioral Traits | | Social Skills | |
|----|--------------------|-----|--------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------|
| | | | | Height (cm) | Weight (kg) | IQ Score | Anxiety Level | Depression Score | Social Support | Friendship Quality | |
| 1 | John Doe | 22 | Male | 180 | 80 | 120 | Low | Very Low | High | Good | Excellent |
| 2 | Jane Smith | 24 | Female | 165 | 70 | 130 | Medium | Medium | Medium | Good | Good |
| 3 | Alex Johnson | 19 | Male | 175 | 65 | 115 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 4 | Samantha Lee | 21 | Female | 155 | 55 | 140 | High | Medium | Medium | Good | Good |
| 5 | Michael Chen | 25 | Male | 190 | 85 | 125 | Low | Very Low | High | Good | Excellent |
| 6 | Emily Davis | 23 | Female | 170 | 75 | 135 | Medium | Medium | Medium | Good | Good |
| 7 | David Wilson | 26 | Male | 185 | 82 | 118 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 8 | Karen Young | 20 | Female | 160 | 60 | 145 | High | Medium | Medium | Good | Good |
| 9 | Matthew Green | 27 | Male | 195 | 90 | 122 | Low | Very Low | High | Good | Excellent |
| 10 | Natalie Brown | 22 | Female | 150 | 50 | 150 | High | Medium | Medium | Good | Good |
| 11 | Christopher Lee | 24 | Male | 178 | 78 | 128 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 12 | Sophia Williams | 21 | Female | 162 | 62 | 138 | Medium | Medium | Medium | Good | Good |
| 13 | Henry Thompson | 28 | Male | 192 | 88 | 112 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 14 | Olivia Parker | 23 | Female | 158 | 58 | 148 | High | Medium | Medium | Good | Good |
| 15 | William Evans | 26 | Male | 182 | 81 | 121 | Low | Very Low | High | Good | Excellent |
| 16 | Mia Rodriguez | 21 | Female | 168 | 72 | 132 | Medium | Medium | Medium | Good | Good |
| 17 | Lucas Martinez | 24 | Male | 172 | 74 | 124 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 18 | Isabella Garcia | 20 | Female | 152 | 52 | 152 | High | Medium | Medium | Good | Good |
| 19 | Jordan Wilson | 25 | Male | 188 | 84 | 116 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 20 | Madison Hayes | 22 | Female | 154 | 54 | 142 | Medium | Medium | Medium | Good | Good |
| 21 | Benjamin Green | 27 | Male | 198 | 92 | 114 | Low | Very Low | High | Good | Excellent |
| 22 | Charlotte Parker | 23 | Female | 164 | 64 | 134 | Medium | Medium | Medium | Good | Good |
| 23 | Thomas Evans | 26 | Male | 184 | 83 | 123 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 24 | Scarlett Wilson | 21 | Female | 156 | 56 | 154 | High | Medium | Medium | Good | Good |
| 25 | Matthew Hayes | 24 | Male | 176 | 76 | 126 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 26 | Elizabeth Green | 20 | Female | 159 | 59 | 149 | High | Medium | Medium | Good | Good |
| 27 | Christopher Wilson | 25 | Male | 196 | 94 | 110 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 28 | Ava Hayes | 22 | Female | 151 | 51 | 141 | Medium | Medium | Medium | Good | Good |
| 29 | Henry Green | 27 | Male | 186 | 86 | 122 | Medium | Very High | Medium | Good | Good |
| 30 | Olivia Wilson | 23 | Female | 166 | 66 | 136 | Medium | Medium | Medium | Good | Good |

| Category | Sub-Category | Parameter | Baseline | | Post-Intervention | | Comparison | | Conclusion | |
|----------|--------------|-----------|----------|----|-------------------|----|-----------------|----|--------------|----------------------|
| | | | Mean | SD | Mean | SD | Mean Difference | SD | Significance | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 1 | 1 | 2 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 1 | 1 | 3 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 1 | 2 | 1 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 1 | 2 | 2 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 1 | 2 | 3 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 2 | 1 | 1 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 2 | 1 | 2 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 2 | 1 | 3 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 2 | 2 | 1 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 2 | 2 | 2 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 2 | 2 | 3 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 3 | 1 | 2 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 3 | 1 | 3 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 3 | 2 | 1 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 3 | 2 | 2 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |
| 3 | 2 | 3 | 100 | 10 | 105 | 10 | 5 | 10 | p < 0.05 | Significant increase |

| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Month | | | | | | | | | | | | |
| January | | | | | | | | | | | | |
| February | | | | | | | | | | | | |
| March | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | |
| May | | | | | | | | | | | | |
| June | | | | | | | | | | | | |
| July | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | |
| October | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | |
| December | | | | | | | | | | | | |

Signature of Director

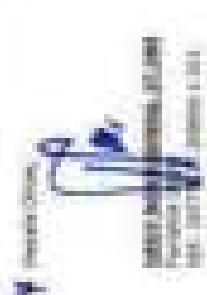


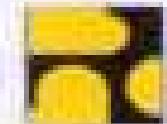
Digitized by srujanika@gmail.com
Digitized by srujanika@gmail.com

| S.No. | Name of the Scheme | Objectives | Key Features | Implementation Status | | Impact | Challenges |
|-------|------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|---|--|
| | | | | Phase I (2019-2022) | Phase II (2023-2025) | | |
| 1 | Smart Irrigation System | To increase agricultural productivity and reduce water usage. | AI-powered sensors, cloud-based data management, mobile app integration. | Ongoing (60%) | Planned (80%) | Improved crop yields, reduced water consumption. | Initial high costs, need for technical expertise. |
| 2 | Renewable Energy Subsidy | To encourage adoption of solar and wind energy. | Financial incentives for installations, grid parity achieved. | Completed (100%) | Planned (70%) | Significant reduction in electricity bills, increased job creation. | Dependency on government subsidies, initial setup costs. |
| 3 | Smart Grid Infrastructure | To enhance power distribution efficiency and reliability. | Advanced metering, real-time monitoring, distributed generation support. | Ongoing (40%) | Planned (90%) | Stable power supply, reduced outages. | High initial investment, coordination between utility companies. |
| 4 | Green Building Certification | To promote sustainable architecture and construction. | Energy efficiency standards, green materials, water conservation. | Ongoing (30%) | Planned (70%) | Reduced energy consumption, improved indoor air quality. | Higher upfront costs, lack of awareness. |
| 5 | Smart Water Management | To optimize water usage and combat drought. | Cloud-based monitoring, AI-driven predictions, water recycling. | Ongoing (50%) | Planned (60%) | Consistent water supply, reduced waste. | Initial costs, public acceptance. |
| 6 | Sustainable Agriculture | To increase food production while reducing environmental impact. | Organic farming, integrated pest management, soil health management. | Ongoing (45%) | Planned (85%) | More nutritious food, reduced greenhouse gas emissions. | Technological challenges, market acceptance. |
| 7 | Smart Manufacturing | To increase industrial efficiency and reduce waste. | AI-powered robotics, predictive maintenance, automation. | Ongoing (35%) | Planned (75%) | Improved product quality, cost reductions. | Initial investment, labor displacement. |
| 8 | Smart Transport Solutions | To reduce traffic congestion and pollution. | Real-time traffic management, electric vehicles, smart infrastructure. | Ongoing (55%) | Planned (80%) | Smooth traffic flow, cleaner environment. | High initial costs, infrastructure development. |
| 9 | Smart Health Initiatives | To improve healthcare delivery and accessibility. | Telemedicine, AI-powered diagnostics, electronic health records. | Ongoing (40%) | Planned (85%) | Improved patient outcomes, lower costs. | Data privacy concerns, initial setup. |
| 10 | Smart Education Platform | To enhance learning experiences and accessibility. | Online courses, adaptive learning, digital textbooks. | Ongoing (30%) | Planned (70%) | Improved learning outcomes, reduced costs. | Technical support, internet connectivity. |



| Group | Sub-Group | Parameter A | Parameter B | Parameter C | Parameter D | Parameter E | Parameter F | Parameter G | Parameter H | Parameter I | Parameter J |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Group 1 | Sub-Group 1.1 | Value 1.1.1 | Value 1.1.2 | Value 1.1.3 | Value 1.1.4 | Value 1.1.5 | Value 1.1.6 | Value 1.1.7 | Value 1.1.8 | Value 1.1.9 | Value 1.1.10 |
| Group 1 | Sub-Group 1.2 | Value 1.2.1 | Value 1.2.2 | Value 1.2.3 | Value 1.2.4 | Value 1.2.5 | Value 1.2.6 | Value 1.2.7 | Value 1.2.8 | Value 1.2.9 | Value 1.2.10 |
| Group 1 | Sub-Group 1.3 | Value 1.3.1 | Value 1.3.2 | Value 1.3.3 | Value 1.3.4 | Value 1.3.5 | Value 1.3.6 | Value 1.3.7 | Value 1.3.8 | Value 1.3.9 | Value 1.3.10 |
| Group 1 | Sub-Group 1.4 | Value 1.4.1 | Value 1.4.2 | Value 1.4.3 | Value 1.4.4 | Value 1.4.5 | Value 1.4.6 | Value 1.4.7 | Value 1.4.8 | Value 1.4.9 | Value 1.4.10 |
| Group 1 | Sub-Group 1.5 | Value 1.5.1 | Value 1.5.2 | Value 1.5.3 | Value 1.5.4 | Value 1.5.5 | Value 1.5.6 | Value 1.5.7 | Value 1.5.8 | Value 1.5.9 | Value 1.5.10 |
| Group 2 | Sub-Group 2.1 | Value 2.1.1 | Value 2.1.2 | Value 2.1.3 | Value 2.1.4 | Value 2.1.5 | Value 2.1.6 | Value 2.1.7 | Value 2.1.8 | Value 2.1.9 | Value 2.1.10 |
| Group 2 | Sub-Group 2.2 | Value 2.2.1 | Value 2.2.2 | Value 2.2.3 | Value 2.2.4 | Value 2.2.5 | Value 2.2.6 | Value 2.2.7 | Value 2.2.8 | Value 2.2.9 | Value 2.2.10 |
| Group 2 | Sub-Group 2.3 | Value 2.3.1 | Value 2.3.2 | Value 2.3.3 | Value 2.3.4 | Value 2.3.5 | Value 2.3.6 | Value 2.3.7 | Value 2.3.8 | Value 2.3.9 | Value 2.3.10 |
| Group 2 | Sub-Group 2.4 | Value 2.4.1 | Value 2.4.2 | Value 2.4.3 | Value 2.4.4 | Value 2.4.5 | Value 2.4.6 | Value 2.4.7 | Value 2.4.8 | Value 2.4.9 | Value 2.4.10 |
| Group 2 | Sub-Group 2.5 | Value 2.5.1 | Value 2.5.2 | Value 2.5.3 | Value 2.5.4 | Value 2.5.5 | Value 2.5.6 | Value 2.5.7 | Value 2.5.8 | Value 2.5.9 | Value 2.5.10 |
| Group 3 | Sub-Group 3.1 | Value 3.1.1 | Value 3.1.2 | Value 3.1.3 | Value 3.1.4 | Value 3.1.5 | Value 3.1.6 | Value 3.1.7 | Value 3.1.8 | Value 3.1.9 | Value 3.1.10 |
| Group 3 | Sub-Group 3.2 | Value 3.2.1 | Value 3.2.2 | Value 3.2.3 | Value 3.2.4 | Value 3.2.5 | Value 3.2.6 | Value 3.2.7 | Value 3.2.8 | Value 3.2.9 | Value 3.2.10 |
| Group 3 | Sub-Group 3.3 | Value 3.3.1 | Value 3.3.2 | Value 3.3.3 | Value 3.3.4 | Value 3.3.5 | Value 3.3.6 | Value 3.3.7 | Value 3.3.8 | Value 3.3.9 | Value 3.3.10 |
| Group 3 | Sub-Group 3.4 | Value 3.4.1 | Value 3.4.2 | Value 3.4.3 | Value 3.4.4 | Value 3.4.5 | Value 3.4.6 | Value 3.4.7 | Value 3.4.8 | Value 3.4.9 | Value 3.4.10 |
| Group 3 | Sub-Group 3.5 | Value 3.5.1 | Value 3.5.2 | Value 3.5.3 | Value 3.5.4 | Value 3.5.5 | Value 3.5.6 | Value 3.5.7 | Value 3.5.8 | Value 3.5.9 | Value 3.5.10 |
| Group 4 | Sub-Group 4.1 | Value 4.1.1 | Value 4.1.2 | Value 4.1.3 | Value 4.1.4 | Value 4.1.5 | Value 4.1.6 | Value 4.1.7 | Value 4.1.8 | Value 4.1.9 | Value 4.1.10 |
| Group 4 | Sub-Group 4.2 | Value 4.2.1 | Value 4.2.2 | Value 4.2.3 | Value 4.2.4 | Value 4.2.5 | Value 4.2.6 | Value 4.2.7 | Value 4.2.8 | Value 4.2.9 | Value 4.2.10 |
| Group 4 | Sub-Group 4.3 | Value 4.3.1 | Value 4.3.2 | Value 4.3.3 | Value 4.3.4 | Value 4.3.5 | Value 4.3.6 | Value 4.3.7 | Value 4.3.8 | Value 4.3.9 | Value 4.3.10 |
| Group 4 | Sub-Group 4.4 | Value 4.4.1 | Value 4.4.2 | Value 4.4.3 | Value 4.4.4 | Value 4.4.5 | Value 4.4.6 | Value 4.4.7 | Value 4.4.8 | Value 4.4.9 | Value 4.4.10 |
| Group 4 | Sub-Group 4.5 | Value 4.5.1 | Value 4.5.2 | Value 4.5.3 | Value 4.5.4 | Value 4.5.5 | Value 4.5.6 | Value 4.5.7 | Value 4.5.8 | Value 4.5.9 | Value 4.5.10 |



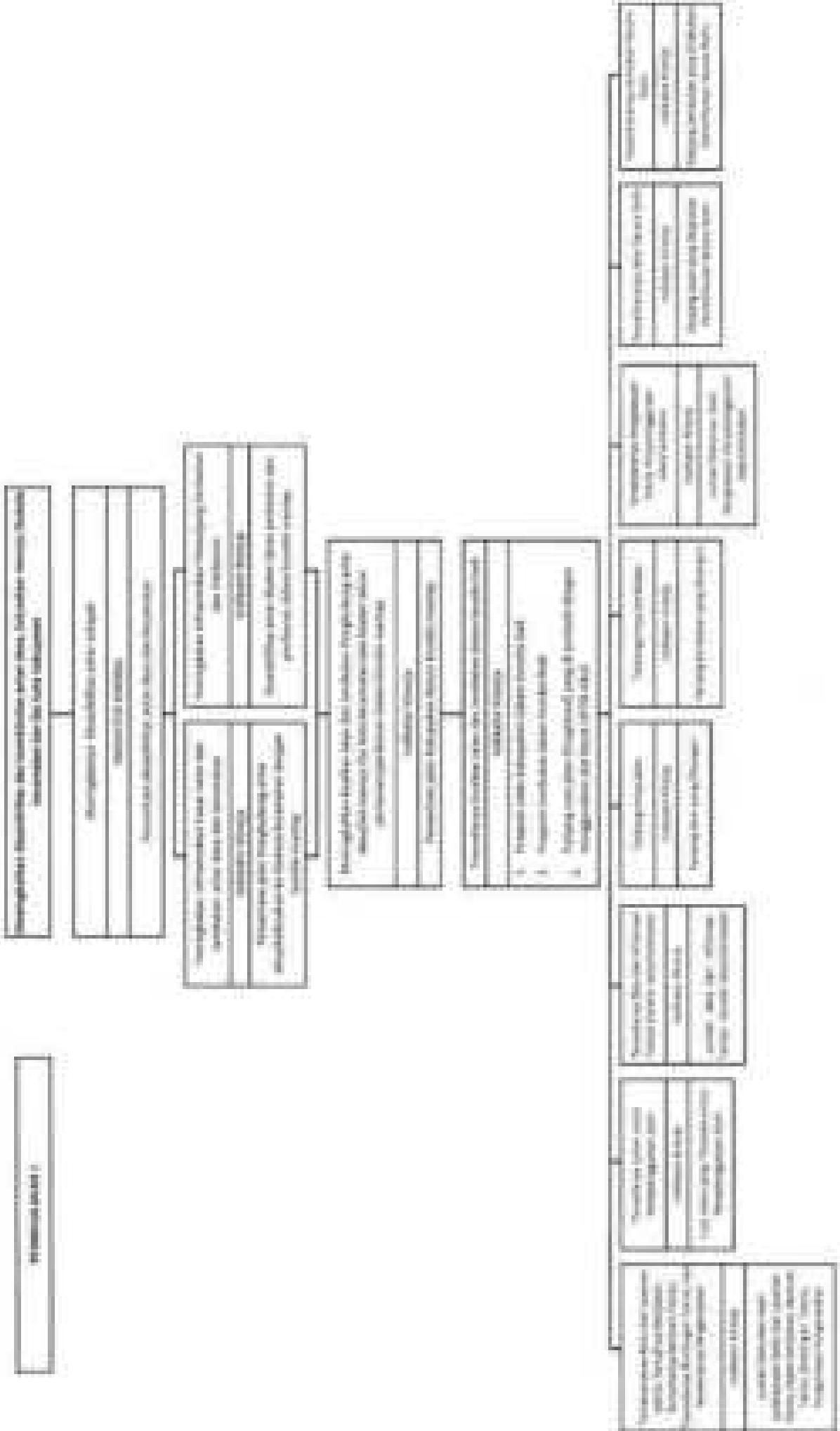


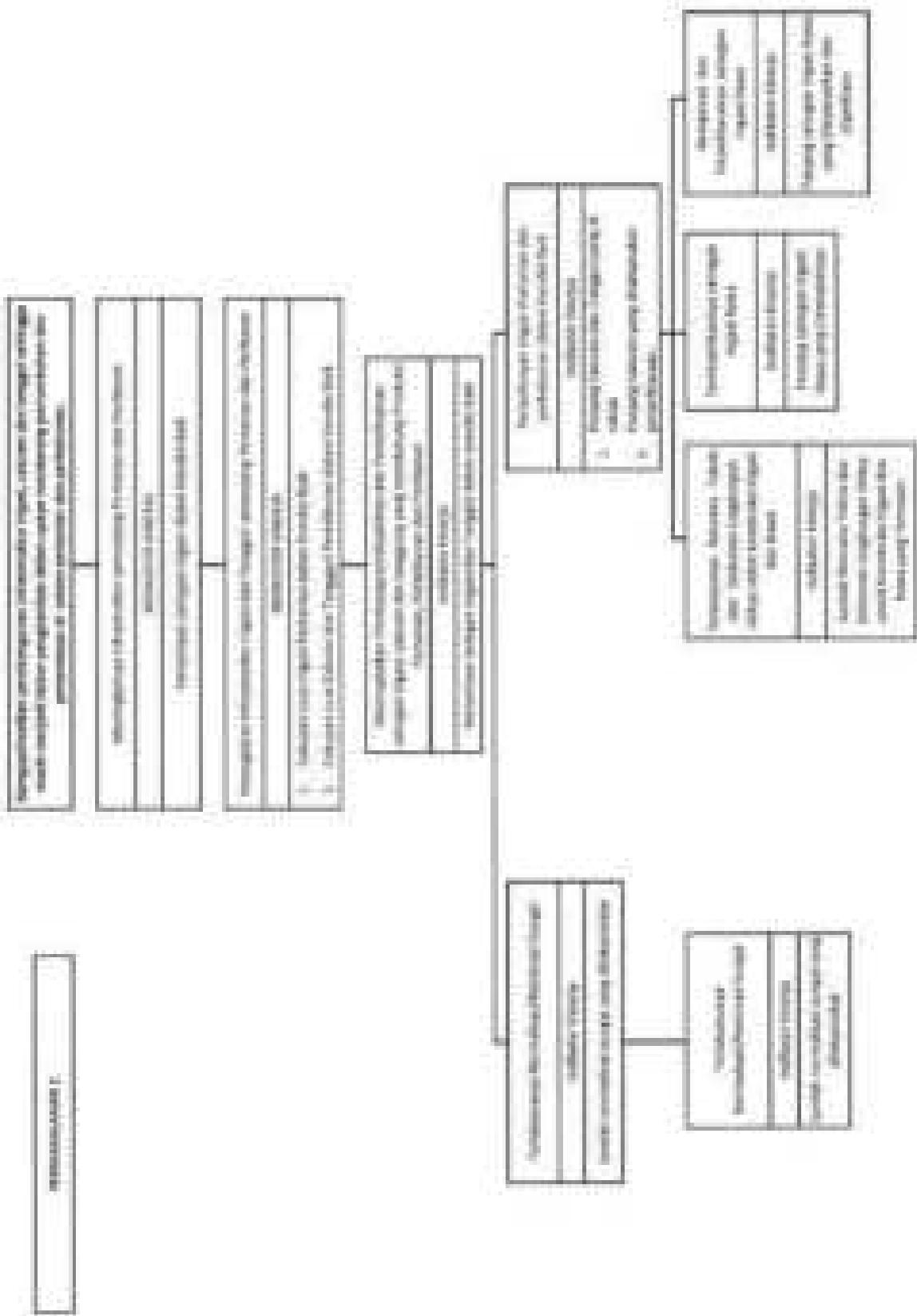
DOHOD KINNEKA

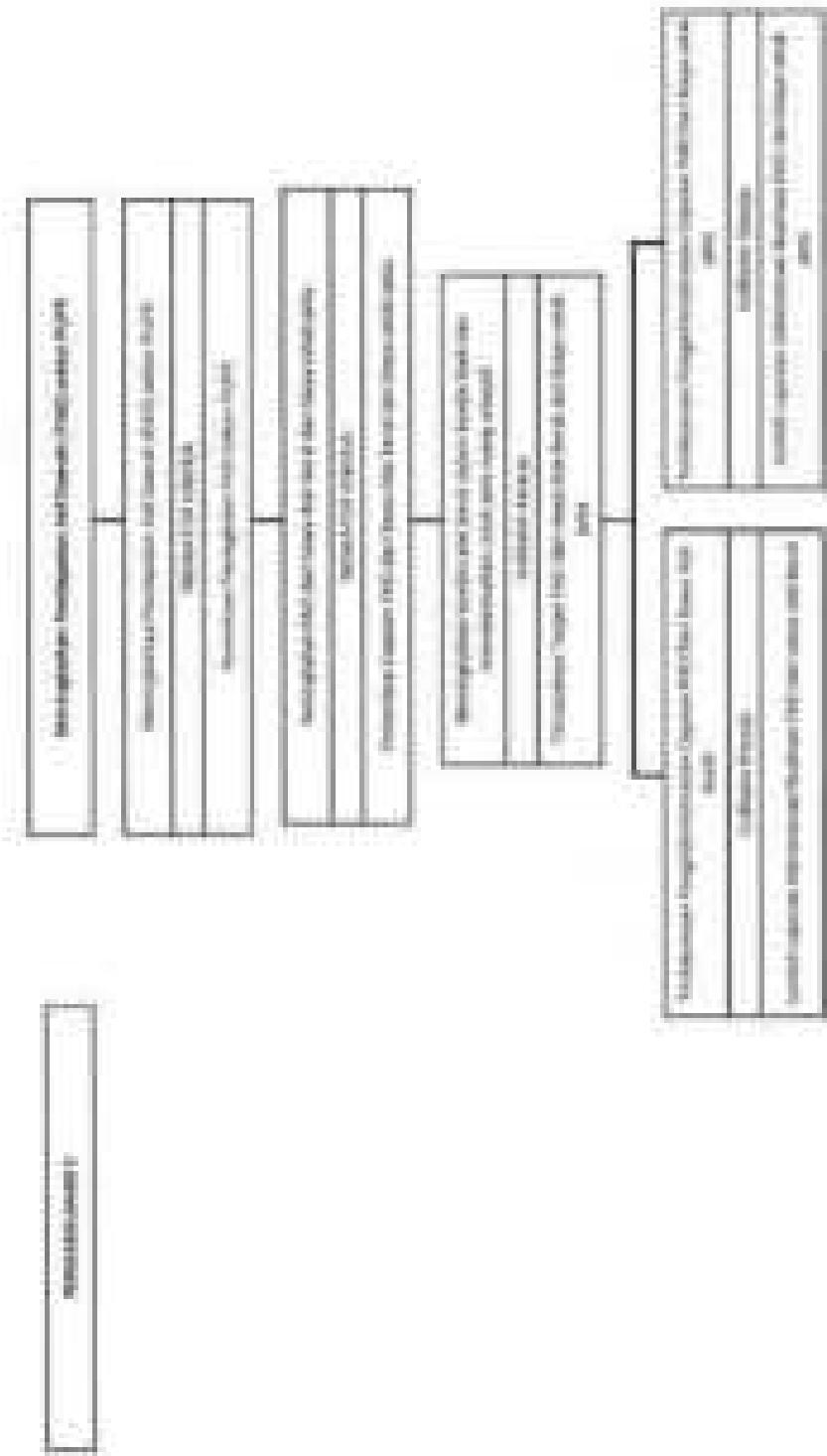
DOHOD KINNEKA
TANAKA HIDEKI

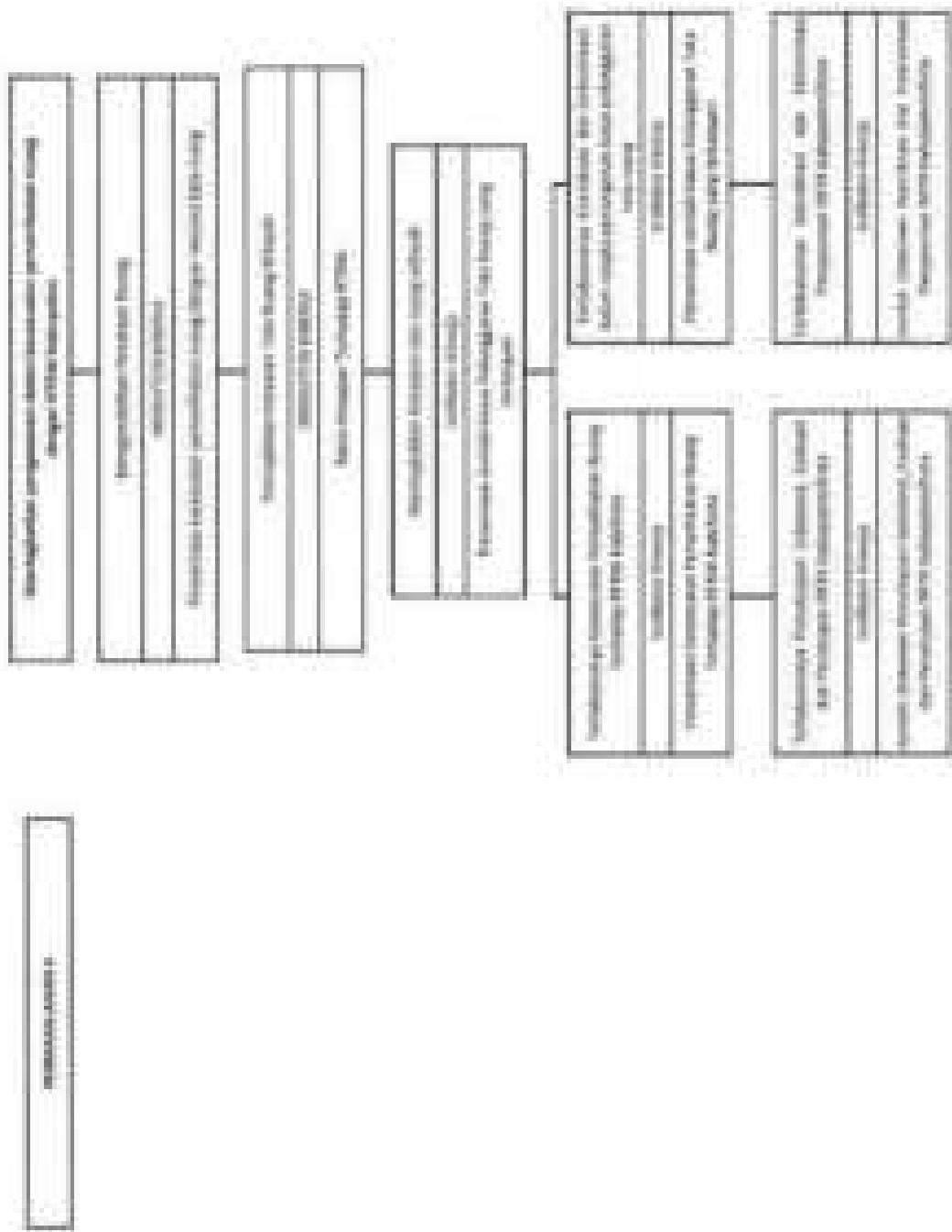
DOHOD KINNEKA
TANAKA HIDEKI

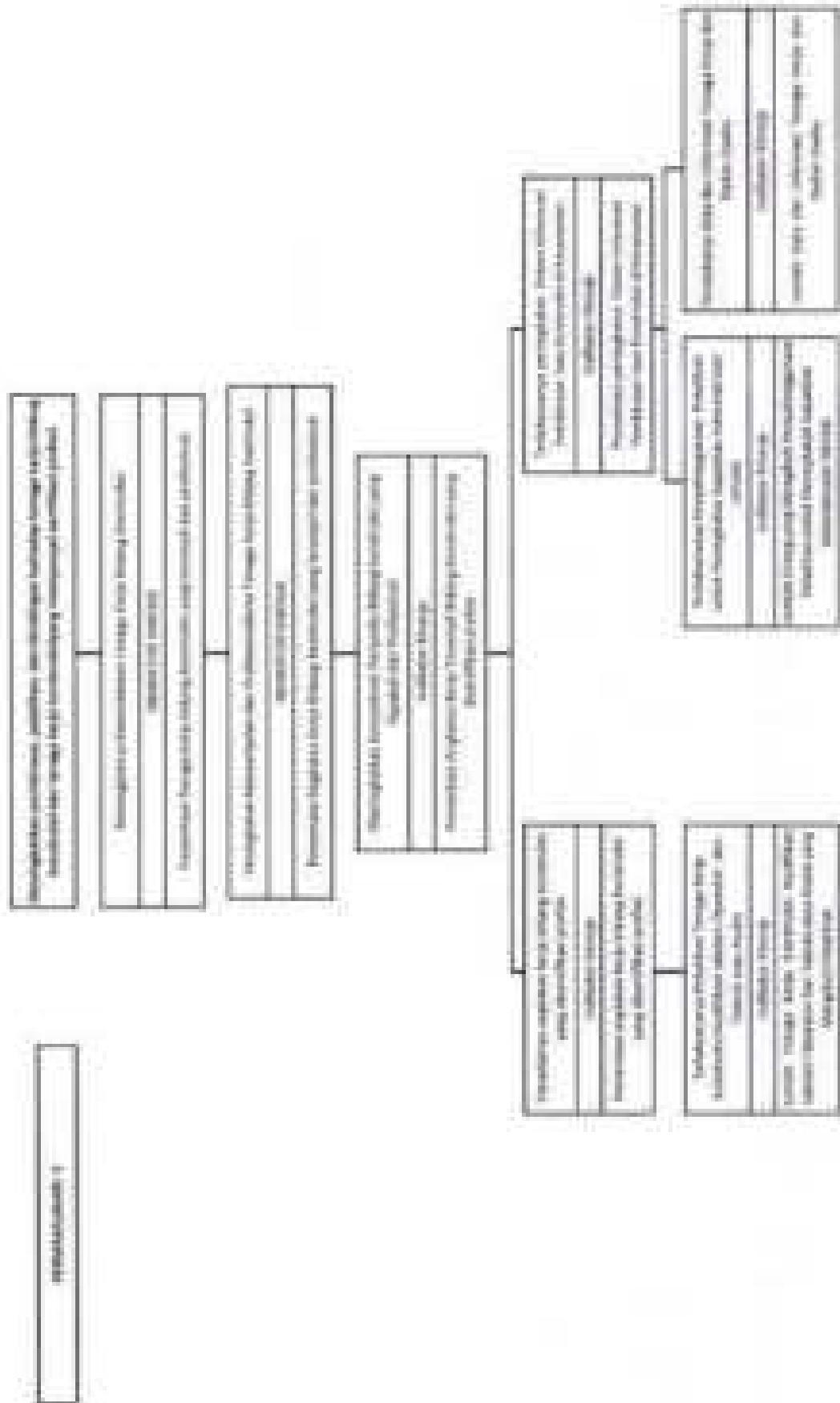


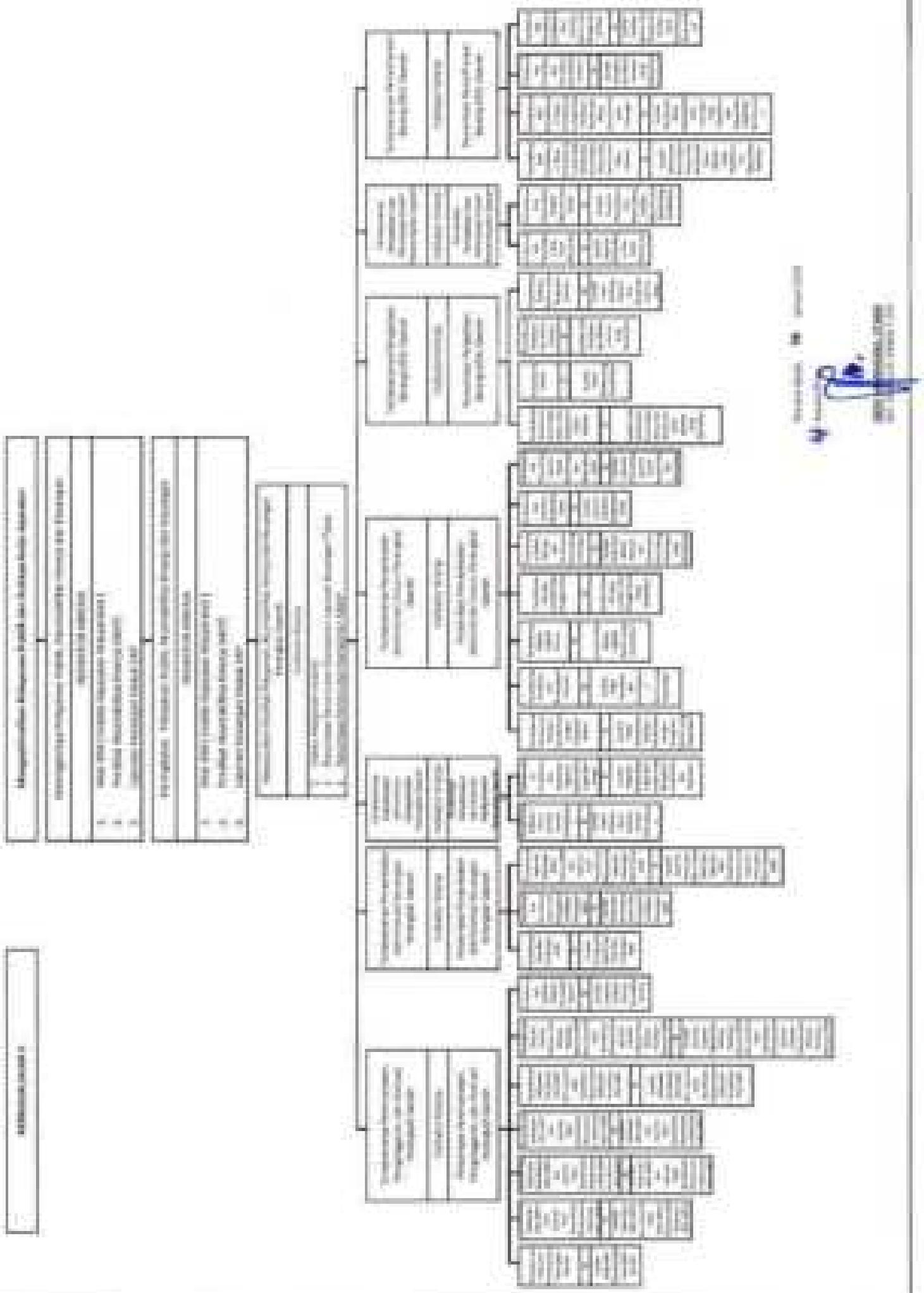






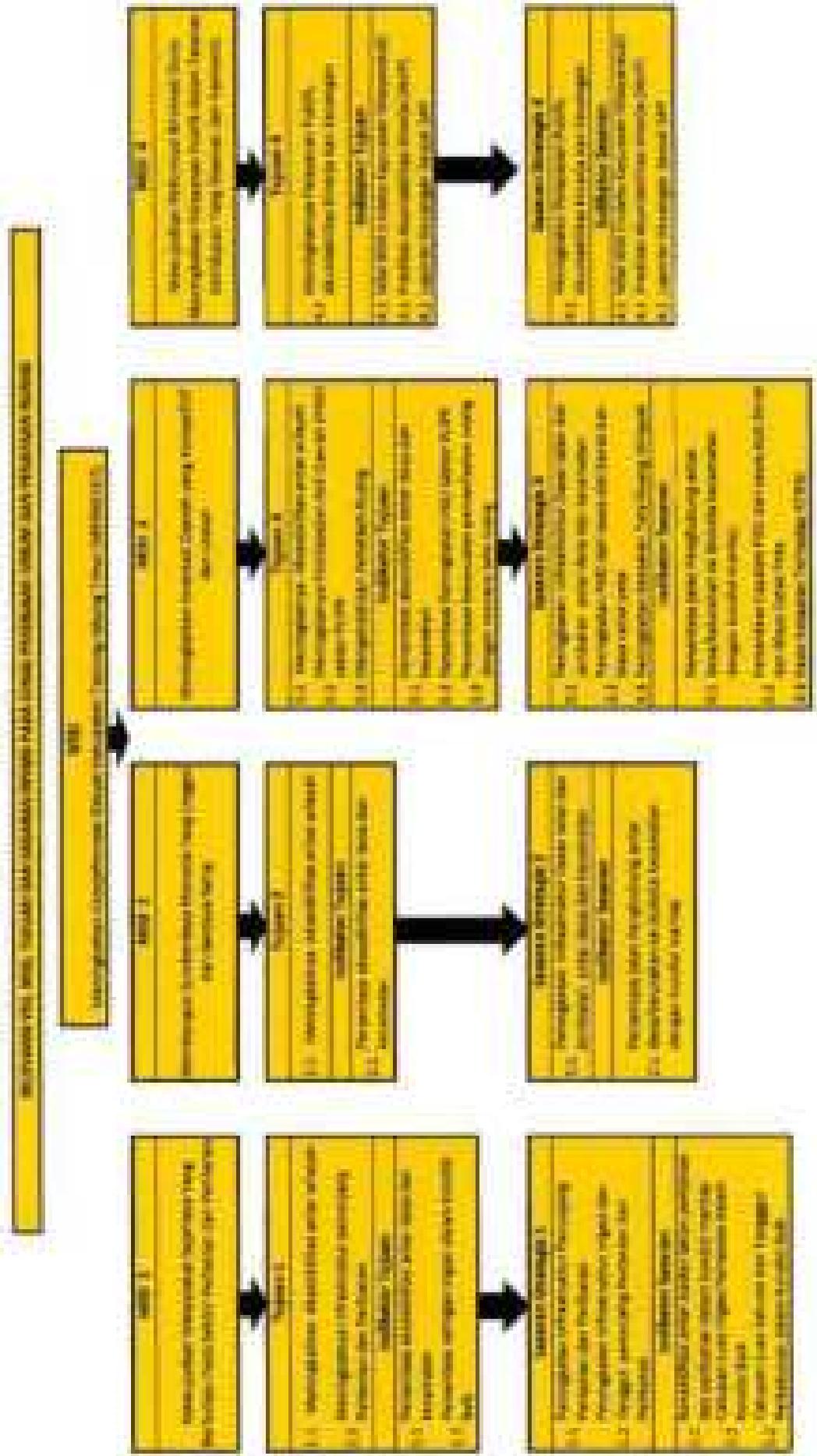


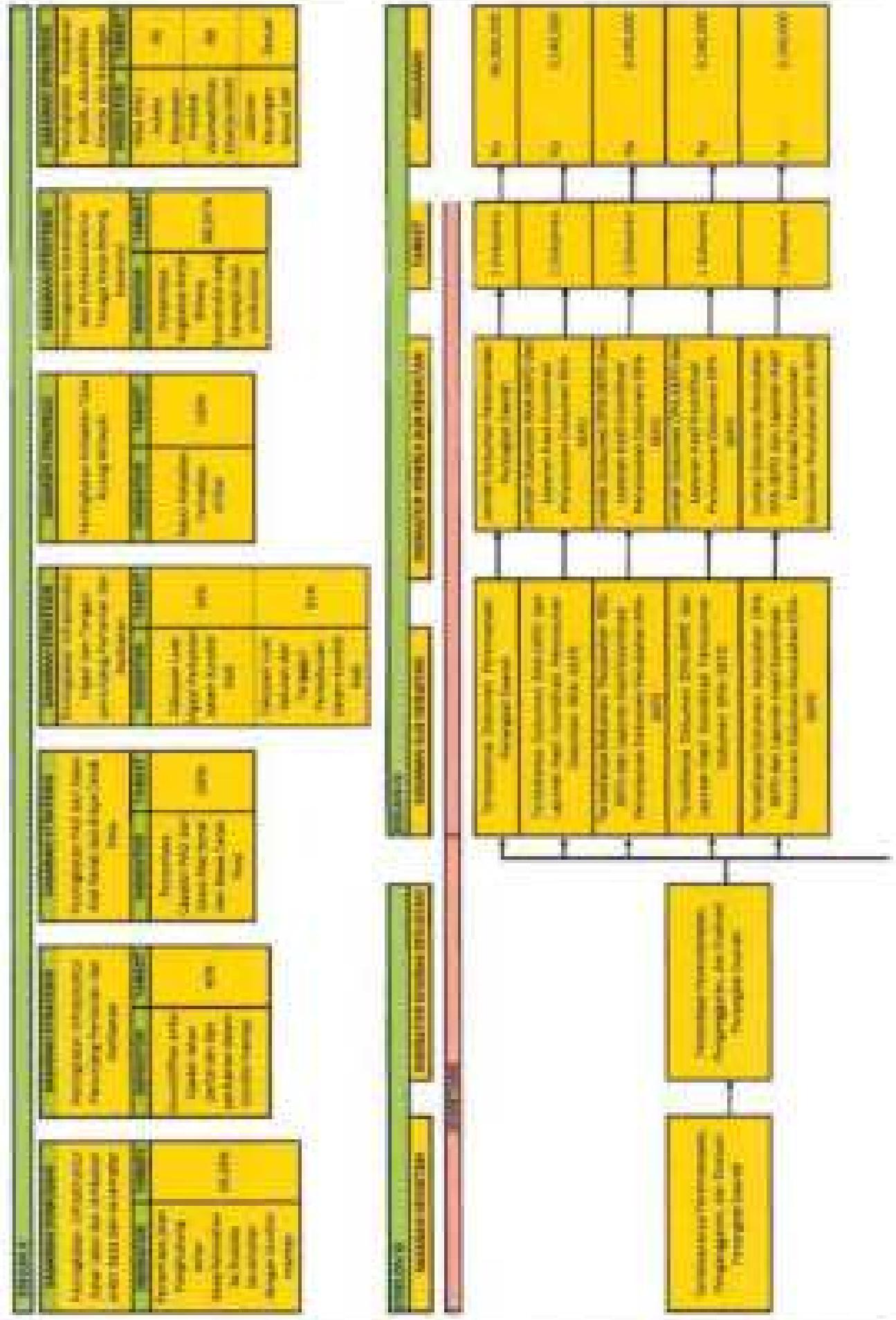


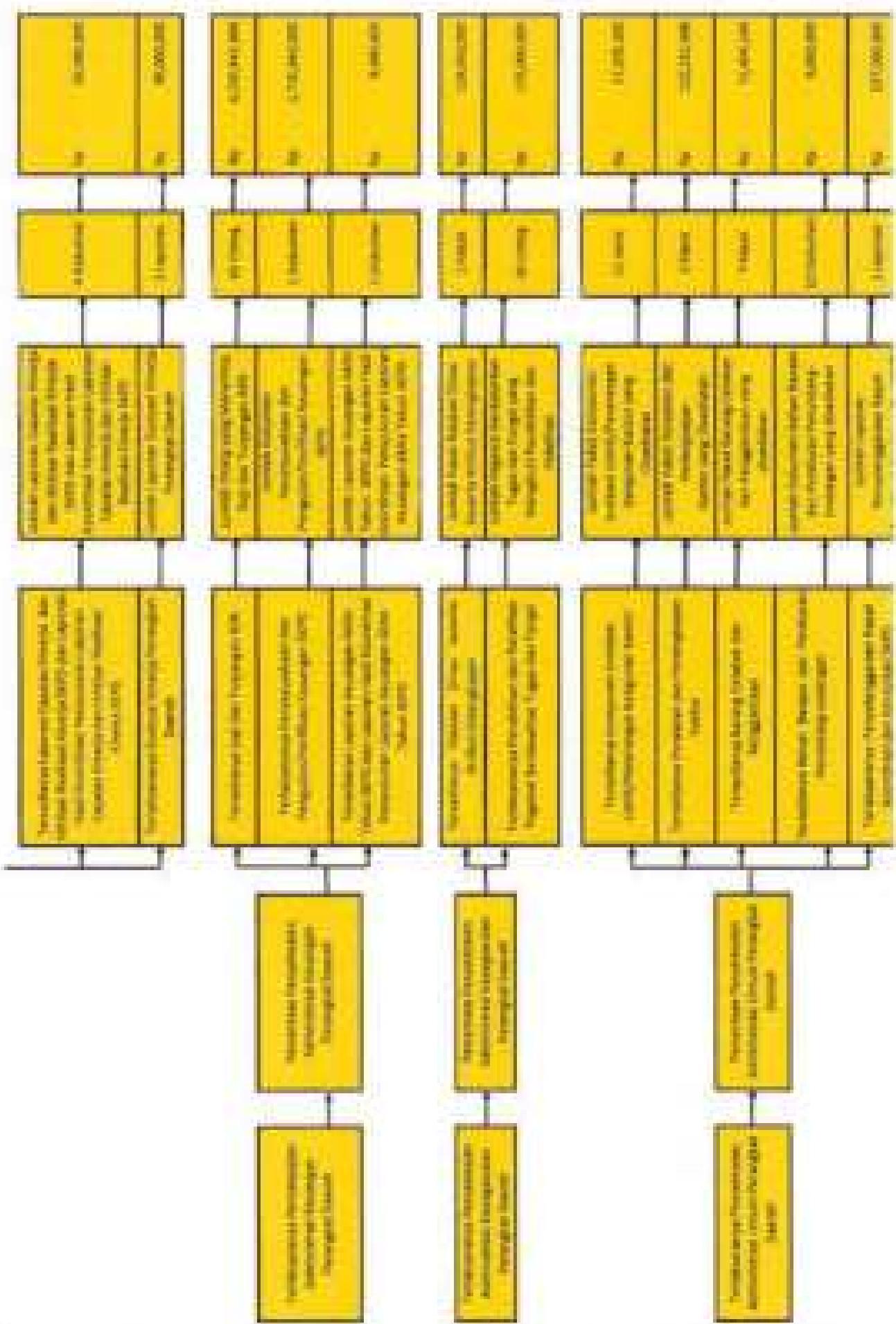


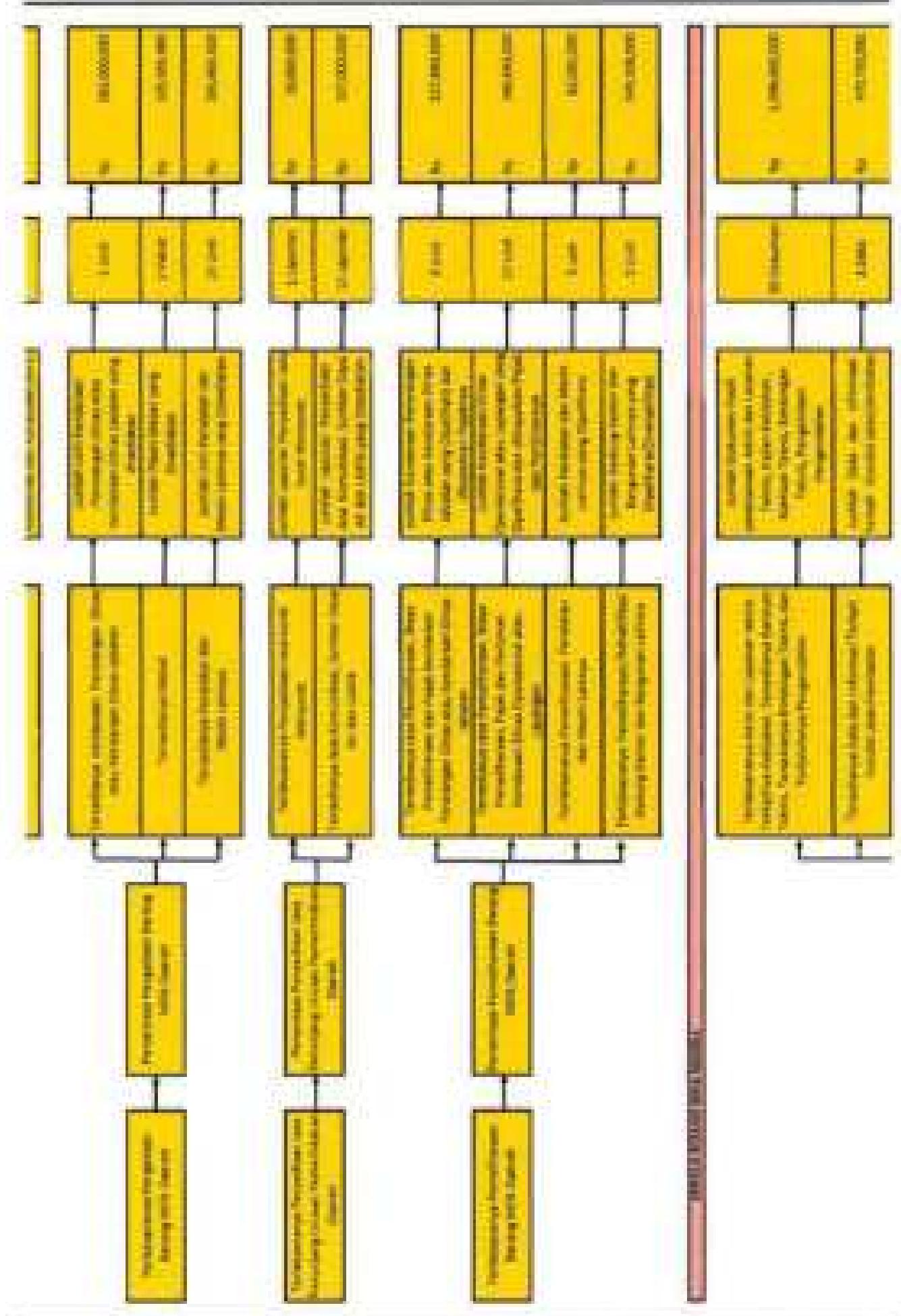
CASCADED

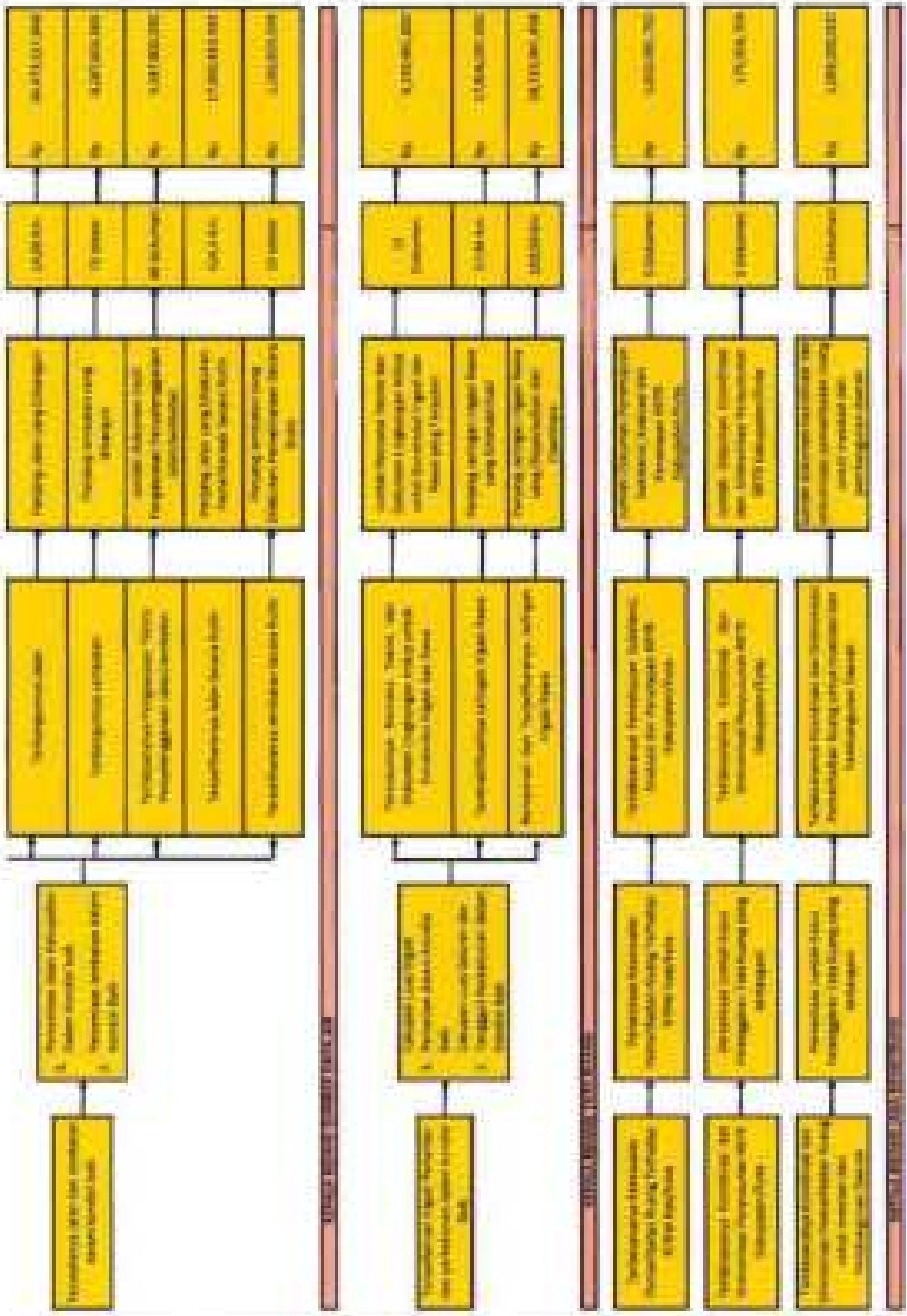
CONSIDER THE FOLLOWING
DATA STRUCTURE AND STATE TRANSITION RULES:
REMOVING ELEMENTS FROM THE END OF A LIST

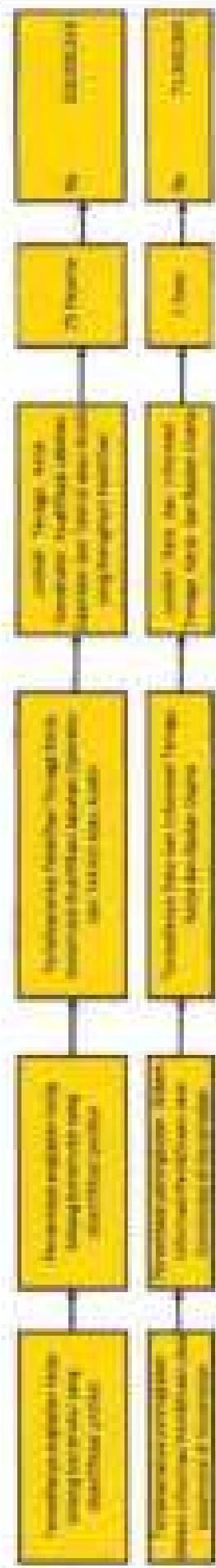












Das ist ein Beispiel für einen
parallelisierten Prozess, z.B. mit zwei
Kernprozessoren.

DUERF PROZESSOR



110-1100000000000000
 (600) 1100000000000000
PHILIPS

4
 4

माना तांत्रिक विद्युतीय उपकरणों के लिए संग्रहीत किया गया है।

स्टॉल विस्तृत और विस्तृत जॉकेट

| वर्ष | प्रक्रिया | प्रक्रिया | प्रक्रिया | प्रक्रिया | प्रक्रिया | प्रक्रिया |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 600 VDC |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 600 VDC |
| 1985 | 600 VDC |
| 1986 | 600 VDC |
| 1987 | 600 VDC |
| 1988 | 600 VDC |
| 1989 | 600 VDC |
| 1990 | 600 VDC |
| 1991 | 600 VDC |
| 1992 | 600 VDC |
| 1993 | 600 VDC |
| 1994 | 600 VDC |
| 1995 | 600 VDC |
| 1996 | 600 VDC |
| 1997 | 600 VDC |
| 1998 | 600 VDC |
| 1999 | 600 VDC |
| 2000 | 600 VDC |

**PANTAUAN DALAM MEMERIKSA JENIS PERHUKUMAN DAN KONDISI DALAM
TARIFIN 2020 - 2023**

| NO | URAIAN / BENDA | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1. | Bank Mandiri | | | | | | | | |
| 2. | BRI | 46.200 | 3,75 | 46.000 | 3,89 | 32.200 | 2,62 | 32.200 | 2,62 |
| 3. | Bank | 220.000 | 16,25 | 220.000 | 18,49 | 220.000 | 18,49 | 220.000 | 18,49 |
| 4. | Bank BCA | 200.000 | 15,00 | 190.000 | 16,25 | 190.000 | 16,25 | 190.000 | 16,25 |
| 5. | Bank BNI | 200.000 | 15,00 | 190.000 | 16,25 | 190.000 | 16,25 | 190.000 | 16,25 |
| | TOTAL JUMLAH | 1.177.200 | 900 | 1.177.200 | 900 | 1.000.000 | 800 | 1.000.000 | 800 |
| 6. | Koperasi BUMN | | | | | | | | |
| 7. | Bank | 220.000 | 16,25 | 220.000 | 18,49 | 220.000 | 18,49 | 220.000 | 18,49 |
| 8. | Bank Mandiri | 100.000 | 7,50 | 100.000 | 8,75 | 100.000 | 8,75 | 100.000 | 8,75 |
| 9. | Bank BCA | 100.000 | 7,50 | 100.000 | 8,75 | 100.000 | 8,75 | 100.000 | 8,75 |
| 10. | Bank BNI | 100.000 | 7,50 | 100.000 | 8,75 | 100.000 | 8,75 | 100.000 | 8,75 |
| | TOTAL JUMLAH | 1.177.200 | 900 | 1.177.200 | 900 | 1.000.000 | 800 | 1.000.000 | 800 |

**DATA JENIS-JENIS PERHUKUMAN YANG DIPERLAKUKAN
TAHUN 2020**

| NO | KELASIFIKASI | JENIS-JENIS | | | | JUMLAH |
|-----|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Rumah | Banteng | Rumah | Banteng | |
| 1. | Murah Sama Sama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Murah Sama Sama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dewasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Cereng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Asam Lemak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Memukul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Memukul (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Barisan Rumah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Barisan Perginya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Barisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Rumah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Banteng, 10 Desember 2020

 **REPUBLIK INDONESIA | MENTERI HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**



**REPUBLIC OF INDONESIA | MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS**

Banteng, 10 December 2020

1000 hours, 1000 days, 1000 years
Elton John - "1000 miles"
WAVES

1000 hours in the same place

| HR | DISTANCE | TIME |
|----|------------|------------|
| 1 | 1000 miles | 1000 hours |
| 2 | 500 miles | 500 hours |
| 3 | 333 miles | 333 hours |
| 4 | 250 miles | 250 hours |
| 5 | 200 miles | 200 hours |
| 6 | 167 miles | 167 hours |
| 7 | 143 miles | 143 hours |
| 8 | 125 miles | 125 hours |
| 9 | 111 miles | 111 hours |
| 10 | 100 miles | 100 hours |
| 11 | 89 miles | 89 hours |
| 12 | 75 miles | 75 hours |
| 13 | 65 miles | 65 hours |
| 14 | 57 miles | 57 hours |
| 15 | 50 miles | 50 hours |
| 16 | 44 miles | 44 hours |
| 17 | 40 miles | 40 hours |
| 18 | 35 miles | 35 hours |
| 19 | 31 miles | 31 hours |
| 20 | 28 miles | 28 hours |
| 21 | 25 miles | 25 hours |
| 22 | 22 miles | 22 hours |
| 23 | 20 miles | 20 hours |
| 24 | 17 miles | 17 hours |
| 25 | 15 miles | 15 hours |
| 26 | 13 miles | 13 hours |
| 27 | 11 miles | 11 hours |
| 28 | 10 miles | 10 hours |
| 29 | 9 miles | 9 hours |
| 30 | 8 miles | 8 hours |
| 31 | 7 miles | 7 hours |
| 32 | 6 miles | 6 hours |
| 33 | 5 miles | 5 hours |
| 34 | 4 miles | 4 hours |
| 35 | 3 miles | 3 hours |
| 36 | 2 miles | 2 hours |
| 37 | 1 miles | 1 hours |

1000 hours = 1000 miles

1000 hours = 1000 miles = 1000 kilometers = 1000 nautical miles

**DATA JARINGAN SALURAN PERKEBUNAN DALAM KONDISI BAJK
KEWENANGAN KABUPATEN TAKUNG TABUNG TIMUR
TAHUN 2021 - 2023**

| No. | PERKEBUNAN BAJKT (DARI SISTEM PUSAT STATISTIK KEPERHITAN) | LUASAN (ha) | JARINGAN PERKEBUNAN KONDISI BAJK (%) | | |
|-------------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
| KELAHATIAN | | | | | |
| 1. | SADU | 11.643 | 8.674 | 10.189 | 10.118 |
| 2. | MURAH TAMBANG | 7.971 | 1.281 | 1.987 | 1.200 |
| 3. | MURAH | 10.000 | 1.474 | 1.199 | 1.000 |
| 4. | RUMITAI SADU | 1.703 | 2.040 | 2.942 | 3.200 |
| 5. | MURAH SADU TIRUJE | 11.667 | 18.213 | 21.441 | 22.262 |
| 6. | MURAH SADU BAJKT | 11.667 | 1.494 | 5.147 | 5.000 |
| 7. | BUKA SADU | 671 | 1.021 | 1.193 | 4.500 |
| 8. | SENGANG | 10.000 | 1.000 | 1.046 | 1.000 |
| 9. | SENGANG | 21.000 | 18.171 | 19.634 | 19.000 |
| 10. | MENGALAM | 11.000 | 19.000 | 21.847 | 22.500 |
| 11. | MENGALAM BAJKT | 17.000 | 6.000 | 7.397 | 7.420 |
| TOTAL | | 882.964 | 98.031 | 107.371 | 103.099 |
| PERSENTASE | | | | | |
| | | | 11% | 9% | 10% |

Maera Salim, PP. Maret 2024

Rekata Dinas Peternakan Umar dan Perikanan Rakyat
Kabupaten Takung Tabung Timur



DINAS PETERNAKAN UMAR DAN PERIKANAN RAKYAT
Kabupaten Takung Tabung Timur

HDP. 18PTL25.2006H.1.002

(Signature)

Mr. John William Smith

(Signature)

John Smith

Constituted by *John Smith*

John Smith

| No. | Address | Phone No. | Date | Method | Amount |
|-----|---------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 1 | 123 Main Street, Anytown, USA | 555-1234 | 2023-01-01 | Cash | \$100.00 |
| 2 | 456 Elm Street, Anytown, USA | 555-2345 | 2023-01-02 | Cash | \$200.00 |
| 3 | 789 Oak Street, Anytown, USA | 555-3456 | 2023-01-03 | Cash | \$300.00 |
| 4 | 123 Pine Street, Anytown, USA | 555-4567 | 2023-01-04 | Cash | \$400.00 |
| 5 | 456 Cedar Street, Anytown, USA | 555-5678 | 2023-01-05 | Cash | \$500.00 |
| 6 | 789 Maple Street, Anytown, USA | 555-6789 | 2023-01-06 | Cash | \$600.00 |
| 7 | 123 Birch Street, Anytown, USA | 555-7890 | 2023-01-07 | Cash | \$700.00 |
| 8 | 456 Ash Street, Anytown, USA | 555-8901 | 2023-01-08 | Cash | \$800.00 |
| 9 | 789 Holly Street, Anytown, USA | 555-9012 | 2023-01-09 | Cash | \$900.00 |
| 10 | 123 Spruce Street, Anytown, USA | 555-0123 | 2023-01-10 | Cash | \$1000.00 |
| 11 | 456 Fir Street, Anytown, USA | 555-1234 | 2023-01-11 | Cash | \$1100.00 |
| 12 | 789 Pine Street, Anytown, USA | 555-2345 | 2023-01-12 | Cash | \$1200.00 |
| 13 | 123 Elm Street, Anytown, USA | 555-3456 | 2023-01-13 | Cash | \$1300.00 |
| 14 | 456 Cedar Street, Anytown, USA | 555-4567 | 2023-01-14 | Cash | \$1400.00 |
| 15 | 789 Oak Street, Anytown, USA | 555-5678 | 2023-01-15 | Cash | \$1500.00 |
| 16 | 123 Birch Street, Anytown, USA | 555-6789 | 2023-01-16 | Cash | \$1600.00 |
| 17 | 456 Ash Street, Anytown, USA | 555-7890 | 2023-01-17 | Cash | \$1700.00 |
| 18 | 789 Holly Street, Anytown, USA | 555-8901 | 2023-01-18 | Cash | \$1800.00 |
| 19 | 123 Spruce Street, Anytown, USA | 555-9012 | 2023-01-19 | Cash | \$1900.00 |
| 20 | 456 Fir Street, Anytown, USA | 555-0123 | 2023-01-20 | Cash | \$2000.00 |

Mr. John Smith has deposited \$10,000.00 in cash into his account.

John Smith